

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS
KOMUNITAS DESA**
(Studi Terhadap BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok Kecamatan
Polanharjo Kabupaten Klaten)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)



Oleh:

NUR KUMILASARI
NIM 1501046059

**PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) bandel

Hal : Naskah Persetujuan Pembimbing

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Nur Kumilasari

NIM : 1501046059

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan/ konsentrasi : PMI/Kesehatan Lingkungan

Judul : **Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Desa
(Studi terhadap BUMDes Tirta Mandiri desa Ponggok
Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)**

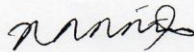
Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diajukan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 10 Oktober 2019

Pembimbing,

Bidang Subtansi Materi



Dr. Agus Rivadi, M.Si

NIP: 19800816 200710 1 003

Bidang Metodologi dan Tata Tulis



Drs. Kasmuri, M.Ag

NIP 19660822 199403 1003

SKRIPSI

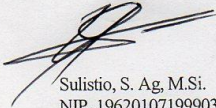
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS DESA
(Studi terhadap BUMDes Tirta Mandiri desa Ponggok
Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)

Disusun Oleh:
Nur Kumilasari
1501046059

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 21 Oktober 2019 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

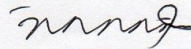
Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



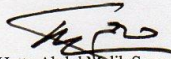
Sulistio, S. Ag, M.Si.
NIP. 19620107199903 2 001

Sekretaris/Penguji II



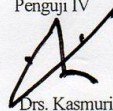
Dr. Agus Riyadi S.Sos.I., M.S.I
NIP. 19800816200710 1 003

Penguji III



Dr. Hatta Abdul Malik S.Sos.I., M.S.I
NIP. 19800311 200710 1 001

Penguji IV



Drs. Kasmuri, S.Ag
NIP. 19660822199403 1 003

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Agus Riyadi S.Sos.I., M.S.I
NIP. 19800816200710 1 003

Pembimbing II



Drs. Kasmuri, S.Ag
NIP. 19660822199403 1 003

Disahkan oleh

Kepala Pusat Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal 25 Oktober 2019



Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag.
NIP. 19620410200112 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Kumilasari
NIM : 1501046059
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS DESA (Studi terhadap BUMDes Tirta Mandiri Desa Pongkok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya serupa yang diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi lain.

Semarang, 10 Oktober 2019

Yang menyatakan,



Nur Kumilasari

NIM. 1501046059

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya yang begitu besar dan tiada terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurakan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi tauladan untuk umatnya termasuk penulis. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, menuju suatu keharusan dan kehormatan bagi penulis untuk menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan fakultas dakah dan komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Sulistio, M.Si selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

4. Dr. Agus Riyadi, M.S.I selaku dosen Pembimbing I, serta Drs. H. Kasmuri selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta ide-ide terbaiknya untuk membimbing dan memberi pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas segala ilmu yang telah diberikan.
6. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
7. Junaedi Mulyono, SH selaku Kepala Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan tulus membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Joko Winarno, S.Pi selaku Direktur BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten yang selalu sabar mendampingi saya selama proses penelitian.
9. Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'ah Al-Hikmah Bapak KH. Ahmad Amnan Muqoddam, Ibu Nyai Hj. Rofiqutul Makiyyah beserta putra putrinya yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mendidik pendidik penulis.
10. Abah Ali Makmur dan Ibu Khodijah yang tak henti-hentinya mendukung dan mendo'akan putrinya.

11. Keluarga besarku AL-MATORI yang tak henti-hentinya memberikan do'a dandukungan sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga Besar IKAMARU (Ikatan Alumni Pesantren Raudlatul Ulum) Semarang yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
13. Temen senampan makan mbak zulfa, dek rina, dek lika, dek uzi, dek izat, nyonya idalillah, mabk ainun yang setia dalam mendengarkan keluh kesah penulis.
14. Adek-adeku nok arik, nok fay, nok essa, nok nia, nok aat, nok indah, nok dian, nok faiq, nok avi, nok vivi, nok rizka, nok zia, nok hero, nok iti, nok rizqi, nok yanti, nok asri, nok afifah, nok sindi, nok anis, nok nazil, khususnya kamar AL-MA'WA tercinta.
15. Teman-temanku kelas PMI 2015 khususnya Tya yang sudah lulus duluan dan Muna.
16. Rekan-rekanku dan semua pihak terkait yang telah banyak membantu dan mendorong serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak penulis sebutkan satu persatu.
17. Serta teruntuk engkau calon Imamku yang sampai saat ini kehadirannya masih di rahasiakan oleh Allah SWT.

Harapan penulis, semoga kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Akan

tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.
Amin.

Semarang, 10 Oktober 2019

Penulis,

Nur Kumilasari
1501046059

PERSEMBAHAN

Sebuah karya ini ku persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku Abah Ali Makmur dan Ibu Khodijah yang telah memberikan cinta dan kasihnya, mendorong, membimbing, serta yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan kepada putrinya untuk setiap langkah dalam mencari ilmu

Keluarga Besarku ALMATORI yang tak pernah putus dalam membimbing, memotivasi, mendorong, serta do'anya untuk selalu berjuang dan semangat dalam menjalankan kehidupan yang berliku dan menuntut ilmu

Dan

Teruntuk orang yang selalu bertanya “**KAPAN SKRIPSIMU SELESAI??**” ini sudah kujawab tanpa harus saya jabarkan kembali

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (QS. Ar-Ra’du [13]: 11)¹

¹ Muhammad Shohib Tohir, Alqur’an dan Terjemahnya, (Surakarta:CV Al-Hanan, 2009), hlm. 250

ABSTRAK

Nur Kumilasari 1501046059, penelitian ini berjudul Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Desa (Studi Terhadap BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah utama yang diderita oleh kaum miskin dan penanggulangannya yang tidak bisa ditunda lagi. Upaya pemberdayaan dapat dilakukan secara individu atau secara kolektif (kelompok sosial). Melalui kelompok tersebut akan terjadi sesuatu yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan program pemerintah yang dibentuk atas dasar disahkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa. BUMDes Tirta Mandiri merupakan salah satu dari sekian banyak BUMDes yang ada di Indonesia. BUMDes Tirta Mandiri bergerak untuk memanfaatkan aset-aset desa. dikonsepkan dengan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas desa dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat desa Ponggok. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana proses pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas desa terhadap BUMDes Tirta Mandiri desa Ponggok kecamatan Polanharjo kabupaten Klaten dan bagaimana hasil pemberdayaan masyarakat berbasis desa terhadap BUMDes Tirta Mandiri kecamatan Polanharjo kabupaten Klaten.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena penelitian ini lebih menekankan analisis terhadap suatu fenomena dan berorientasi untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui cara

berfikir formal dan argumentatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul penulis menggunakan teknik analisa seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk proses analisa data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas desa pada BUMDes Tirta Mandiri desa Ponggok kecamatan Polanharjo kabupaten Klaten berjalan dengan baik mulai dari tahap pemaparan masalah, analisis masalah, penentuan tujuan dan saran, perencanaan tindakan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi. BUMDes Tirta Mandiri telah memberikan hasil yang positif kepada penerima manfaat, mulai dari perekonomian yang awalnya masyarakat Ponggok hanya bergantung pada penghasilan suami dan penganguran kini warga bisa mandiri dan diberdayakan dengan adanya BUMDes dan dibukanya pekerjaan untuk warga desa Ponggok, sosial kekeluargaan antara warga satu dengan warga lain begitu erat, kerjasama warga Ponggok juga baik saling membantu satu sama lain. Lingkungan desa Ponggok yang bersih dan sejuk membuat keasrian desa Ponggok tersendiri, juga dalam bidang keagamaan dimana BUMDes Tirta Mandiri selalu memberangkatkan umroh untuk 1 orang/ tahun dengan cara mengundinya, ibadah warga Ponggok sudah baik, pengajian rutin selalu diadakan dan sudah mampu untuk mengeluarkan zakat sendiri.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Desa Pada BUMDes

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	18
F. Metode Penelitian.....	18

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Masyarakat	24
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	24
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	30
3. Indikator Pemberdayaan Masyarakat	34
4. Proses Pemberdayaan Masyarakat	39
5. Metode Pemberdayaan	48
B. Komunitas.....	54
1. Pengertian Komunitas	54
2. Jenis Komunitas	59
3. Ciri-ciri Komunitas Komunitas	62

BAB III

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS DESA TERHADAP BUMDES TIRTA MANDIRI DESA PONGGOK KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN

A. Gambaran Umum Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	
1. Keadaan Geografis dan Batas Wilayah.....	67
2. Pemanfaatan Tata Ruang	71
3. Kondisi Demografi.....	71

4. Keadaan Sosial Ekonomi.....	75
B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	
Ponggok Tirta Mandiri	
1. Profil Badan Usaha Milik Desa	
Tirta Mandiri	76
2. Visi dan Misi BUMDes Tirta	
Mandiri	79
3. Sejarah BUMDes Tirta Mandiri	81
4. Logo BUMDes Tirta Mandiri.....	85
C. Proses Pemberdayaan Masyarakat	
Berbasis Komunitas Desa terhadap	
BUMDes Tirta Mandiri desa Ponggok	
Kecamatan Polanharjo Kabupaten	
Klaten.....	89
D. Hasil Pemberdayaan Masyarakat	
Berbasis Komunitas Desa terhadap	
BUMDes Tirta Mandiri desa Ponggok	
Kecamatan Polanharjo kabupaten	
Klaten.....	115

BAB IV ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS DESA PADA BUMDES TIRTA MANDIRI

1. Analisis proses pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas desa terhadap BUMDes Tirta Mandiri desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten 127
2. Analisis hasil pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas desa terhadap BUMDes Tirta Mandiri desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten..... 135

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 145
- B. Saran-saran 147
- C. Penutup 147

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Tabel 2

Tabel 3

Tabel 4

Tabel 5

Tabel 6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan terutama yang diderita oleh kaum miskin merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda lagi dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial (Arsini, 2013:3). Meskipun dalam tingkatan yang berbeda, tidak ada satupun Negara yang kebal dari kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia menetapkan bahwa masyarakat Indonesia yang kini masih terbilang miskin adalah individu yang pengeluarannya dalam satu harinya kurang dari Rp 13.374. Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia menetapkan garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran yang merupakan perkiraan untuk menggambarkan pendapatan seseorang untuk memenuhi sejumlah kebutuhan (Suharto, 2013: 15).

BPS mencatat Indonesia mengalami titik terendah dalam hal presentase kemiskinan yaitu pada maret 2018, ini adalah untuk pertama kalinya presentase penduduk

mengalami persentase penduduk miskin di angka 1, biasanya 2 digit. Suharyono mengungkapkan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September mengungkapkan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada september 2017 sebesar 7,26 persen, turun menjadi 7,02 persen pada maret 2018 (www.bps.go.id). Sedangkan, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 13,47 persen turun menjadi 13,20 persen pada maret 2018. Kemudian pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen terhadap Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang pada maret 2018. Penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 6,89 persen turun menjadi 6,69 persen pada Maret 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 sebesar 13,10 persen turun menjadi 12,85 persen pada Maret 2019 (www.bps.go.id [pressrelease/2019/07/15/1629](http://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629)).

Upaya pengembangan masyarakat pada dasarnya merupakan suatu upaya pemberdayaan warga komunitas. Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individu maupun secara kolektif (kelompok-kelompok sosial). Akan tetapi dengan memperhatikan kasus Indonesia dimana hasil

pembangunan dalam dekade tiga Tahun terakhir ini telah menimbulkan perubahan sosial tingkat komunitas, salah satu cirinya adalah terjadi kesenjangan ekonomi, kemampuan individu “senasib” untuk mengorganisir diri dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif di tingkat komunitas. Melalui kelompok akan terjadi sesuatu yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok. Anggota kelompok menumbuhkan identitas seragam dan mengenali kepentingan mereka bersama (Fredian 2014:96-97).

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya adalah sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Konsep *locality development* diharapkan lebih mampu menggerakkan masyarakat yang memiliki kesamaan kebutuhan dan kepentingan dibandingkan dengan konsep wilayah yang lebih luas. Namun dengan demikian, tidak semua masalah bisa diatasi di tingkat lokal sehingga perlu diintegrasikan

dengan pembangunan masyarakat ditingkat yang lebih luas (regional atau nasional) (Harry, 2013:53).

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan bawah, yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin. Pemerintah telah membuat program Inpres Desa Tertinggal (IDT) Instruksi Presiden guna mengentaskan kemiskinan di pedesaan tertinggal pada masa pemerintahan orde baru. Program ini merupakan manifestasi dari instruksi Presiden No. 5 tahun 1993 tentang peningkatan Penanggulangan Kemiskinan Program IDT (UU No. 5 Tahun 1993).

Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembangunan desa kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat, daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah

tertinggal, penyiapan, pembangunan pemukiman dan pembangunan kawasan transmigrasi (Peraturan Presiden No 12 pasal 2 dan 3 tahun 2015).

Berdasarkan peraturan undang-undang itu maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan masyarakat. oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di pedesaan melalui kelembagaan yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu progam andalan memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kemandirian perekonomian desa.

BUMDes diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Hal ini dijelaskan secara eksplisit dalam pasal 23 ayat 1, tentang Pemerintahan Desa, disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” disebutkan juga bahwa tujuan utama berdirinya badan usaha milik desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian keseriusan pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes dibuktikan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005

Tentang Desa dan pemendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes sebagai kebijakan tersebut menandakan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan BUMDes (Peraturan Menteri Desa PDTT No 15 tahun 2015).

Pelambangan BUMDes untuk pemberdayaan dan penggerak potensi desa, bertujuan untuk mendukung kebijakan makro pemerintah (UU No 32/2004) dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya di pedesaan. Pemberdayaan BUMDes secara melembaga di tingkat desa diharapkan akan mengembangkan segala potensi desa untuk kesejahteraan masyarakatnya. BUMDes diharapkan dapat mencerdaskan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan mensejahterakan desa-desa meraka. Karena BUMDes dapat menjadi wadah bagi pemerintah Desa untuk memberdayakan dan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang ada di desa. Sehingga diharapkan dapat menjadikan masyarakat yang mandiri dengan berwirausaha (Buku Panduan dan Pengelolaan BUMDes, 2017:2). Oleh karena itu, dengan adanya BUMDes diharapkan akan terjadinya pemberdayaan masyarakat dalam suatu tatanan masyarakat pedesaan, maka hal ini BUMDes mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan masyarakat desa. Salah satu progam yang ada dalam upaya pengentasan kemiskinan dan sebagai suatu tujuan pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam BUMDes, yaitu BUMDes Tirta Mandiri. Upaya pemerintahan

desa dalam memberdayakan masyarakat apabila diintergrasikan tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ra'du ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. (QS Ar-Ra'du: 11).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT tidak akan merubah keadaan seseorang/kelompok, selama mereka tidak merubah sebab-sebab dari kemunduran mereka. Makna yang diambil dari ayat tersebut adalah berisi tentang upaya atau usaha-usaha yang dilakukan untuk merubah agar menjadi lebih baik.

BUMDes Tirta Mandiri adalah badan usaha milik desa yang terletak di desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. BUMDes Tirta Mandiri memang menunjukkan perkembangan yang fantastis. Pada tahun 2012 pendapatan kotor yang diperoleh BUMDes Tirta Mandiri adalah bekisar di angka Rp 150 juta. Baru setahun kemudian, meningkat menjadi Rp 600 juta. Tahun 2014, melonjak menjadi Rp 1,1 miliar. Pada tahun 2015, melebihi target yang di tentukan Rp 3,8 miliar mencapai Rp 6,5 miliar. Kemudian pada tahun 2016 yang bermula target Rp 9 miliar terealisasi menjadi Rp 10,3 miliar. Dan pada tahun 2017 penghasilan BUMDes Tirta Mandiri

mencapai Rp 12 miliar(Wawancara dengan Ibu Sari sebagai Sekretaris BUMDes Tirta Mandiri, Tanggal 17 Februari 2019).

BUMDes Tirta Mandiri dibentuk dan dipercaya mengelola obyek wisata secara profesional. Banyak warga yang berminat untuk menanamkan modal sehingga ekonomi terus bergulir. Untuk saat ini hampir 76% keluarga di ponggok yang berinvestasi. Nilai investasi sekitar Rp 5 juta per keluarga dengan bagi hasil yang diperoleh 7-15% per bulan. Selain warga sejumlah lembaga di Ponggok juga turut berinvestasi di BUMDes Tirta Mandiri. Tiap RW berinvestasi masing-masing Rp 50 Juta, sedangkan untuk PKK Rp 100 juta, PAUD/TK berinvestasi Rp 25 Juta. Denganturut berinvestasi, PAUD/TK di desa Ponggok setiap Bulanya mempunyai Rp 2,5 juta untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Berkat pencapaian prestasi itu, tahun 2017 BUMDes Tirta Mandiri dinyatakan sebagai pemenang dalam pengelolaan BUMDes terbaik. Dan mendapat penghargaan sebagai pemenang kategori Desa Wisata Pemberdaya Masyarakat. Sebuah penghargaan yang diberikan Kementerian Desa PDIT dalam expo BUMDes Nusantara 2017 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Hal itu bukan sebuah pencapaian yang secara tiba-tiba terjadi. Beberapa tahun sebelum Tirta Mandiri berdiri, Desa ponggok terbilang masih

sangat memprihatinkan. Kehidupan sosial ekonomi sebagian besar penduduknya tercatat berada dibawah garis kemiskinan. Karena itulah, desa inimenjadi salah satu desa tertinggal dan masuk dalam Inpres Desa Tertinggal (IDT). Awal terbentuknya BUMDes usaha yang dikelola hanya toko pakan ikan dan pinjaman modal bagi masyarakat serta merintis kegiatan pariwisata Umbul Ponggok sebagai wahana rekreasi. Tetapi sekarang BUMDes Tirta Mandiri sendiri sudah mempunyai 13 unit usaha. Selain wisata Umbul Ponggok yang terkenal karena foto bawah air yang *instragramable* juga ada usaha retail, kuliner, penyewaan gedung, toko desa, wisata Umbul Ciblon, home stay dan lainnya (wawancara dengan Ibu Sari, Tanggal 17 Februari 2019).

Sesuai dengan diterbitkannya Undang-Undang No 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam bab VII bagian kelima yang menyatakan Pemerintahan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

Berdasarkan Undang-Undang yang telah diterapkan tersebut, maka muncul gagasan dari Kepala Desa Ponggok melalui mekanisme musyawarah sebagai wujud melembagakan demokrasi lokal dengan mempertemukan BPD, Pemerintah Desa dan Kelompok warga untuk

membahas isu-isu strategis salah satunya soal pendirian BUMDes. Mendirikan BUMDes pada dasarnya membangun tradisi berdemokrasi di desa untuk mencapai derajat ekonomi masyarakat desa yang lebih tinggi. Dengan bekal daftar potensi dan peta aset desa, forum musyawarah Desa Ponggok melakukan praktik *deliberative democracy* untuk menyepakati gagasan pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset desa melalui BUMDes. Dengan pertimbangan yang matang pemerintah Desa Ponggok mendirikan BUMDes pada tanggal 15 Desember 2009 berdasarkan keputusan yang dituangkan dalam peraturan Desa No 06 Tahun 2009 dengan nama BUMDes Tirta Mandiri (Aini, 2017:2). Oleh karena itu dengan adanya BUMDes Tirta Mandiri ini, peneliti tertarik untuk menelitinya. Karena bisa menjadi contoh bagi masyarakat atau desa lain untuk memberdayakan masyarakatnya melalui BUMDes yang ada di desa dan hasil yang dicapai dalam memberdayakan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas desa melalui BUMDes desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana hasil pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas desa melalui BUMDes desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan peneliti ini adalah:

- a) Untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas desa melalui BUMDes di desa Ponggok kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten
- b) Untuk mengetahui bagaimana hasil pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas desa melalui BUMDes di desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten

2. Manfaat Penelitian

a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat keilmuan dalam bidang memberdayakan masyarakat berbasis komunitas, serta hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai acuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian yang akan datang.

b) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kesadaran kepada pemerintah, masyarakat, dan akademisi untuk bersama-sama dalam melakukan pemberdayaan dengan memanfaatkan komunitas desa yang dimiliki serta

mampu memberikan gambaran proses dan pemberdayaan berbasis komunitas desa.

D. Tinjauan Pustaka

Mengenai perihal penelitian sebelumnya, berdasarkan studi pustaka peneliti dalam menghindari kesamaan penulis dan plagiat. Penulis mencantumkan

Pertama, skripsi oleh Agung Septian Wijanarko (2012) yang berjudul “peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat di desa Pandankrajan kecamatan Kemilangi kabupaten Mojokerto”. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian: tepat jaminan, tepat subyek, tepat waktu, tepat tempat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dengan key person dan informan serta dokumentasi dari arsip kantor BUMDes Desa Pandankrajan.

Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang telah mendirikan BUMDes. Yang di amanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pembukaan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah ditetapkan dalam perda Kabupaten Mojokerto tersebut diharapkan pemerintah Desa dapat memahami tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan di harapkan dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya desa tertinggal atau desa yang tingkat perekonomiannya rendah.

Pemerintah desa Pandankrajan menginginkan pembentukan dan pengelolaan BUMDes untuk memberdayakan masyarakat desa Pandankrajan. Peran Pemerintahan Desa adalah untuk membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga sebagian bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya.

Kurangnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan tingkat ekonomi masyarakat desa Pandankrajan yang masih rendah itu karena masyarakat desa Pandankrajan yang rata-rata bekerja sebagai petani, diharapkan dengan adanya BUMDes ini mampu mendorong masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berbeda dari penelitian ini berada pada program-program kegiatan pemberdayaan yang masih rendah, namun program program kegiatan yang saya teliti sudah tertata dan teratur.

Kedua, skripsi dari Diantika Ovi Era Tama (2013) yang berjudul Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi kesejahteraan Masyarakat di desa Karangrejek kecamatan Wonosari kabupaten Gunung Kidul. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi,

dan observasi dengan subyek penelitian yaitu Kepala Desa, pengelola BUMDes.

Hasil penelitian yang disebutkan penulis ini adalah menunjukkan bahwa BUMDes Karangrejek telah berhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat meskipun unit-unit dari BUMDes belum berjalan secara keseluruhan. BUMDes Karangrejek juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat desa yang lebih terjamin. Pembangunan desa pun semakin lancar dengan adanya dana yang dihasilkan dari BUMDes. Selain itu juga adanya partisipasi masyarakat yang begitu tinggi membuat BUMDes Karangrejek semakin maju. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti sekarang adalah sama tentang BUMDes. Akan tetapi, jika penelitian ini berfokus pada dampak dari adanya BUMDes ke masyarakat terhadap kesehatan penelitian saya kali ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat yang dengan naungan adanya BUMDes di desa Ponggok.

Ketiga, Jurnal Ilmiah oleh Ratna Azis Prasetyo (2016) yang berjudul “peran BUMDes dalam Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara terstruktur dengan kuersioner untuk pengumpulan data pimer

dan sekunder. Data primer diperoleh wawancara secara langsung dengan masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sebanyak 50 orang untuk mengetahui secara langsung partisipasi masyarakat serta kontribusi BUMDes bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. selain wawancara terstruktur, dilakukan juga *indepth interview* kepada beberapa perangkat desa untuk mengumpulkan informasi yang lebih lengkap tentang pelaksanaan BUMDes serta kontribusinya terhadap pembangunan desa.

Hasil dari peneliti ini adalah bahwa partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan BUMDes adalah masih rendah. Hal ini terlihat dari pengetahuan masyarakat tentang program BUMDes. Program kegiatan BUMDes Kejambon tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Di dalam penelitian ini 54% responden yang tau tetapi hanya sedikit saja. Hal ini juga tercermin dari pengakuan 60% yang mengatakan tidak pernah memperoleh bantuan dari program BUMDes dan hanya 34% saja yang mengaku pernah menerima bantuan. Perbedaan dari penelitian ini masyarakat yang belum mengetahui kegiatan-kegiatan dari BUMDes Kejambon yang tidak banyak diketahui oleh masyarakatnya. Namun di penelitian saya masyarakat mengetahui dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes Tirta Mandiri.

Keempat, skripsi dari Moh. Imamuddin (2018) yang berjudul “partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) studi di desa Payaman Kecamatan Sulokuro Kabupaten Lamongan”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan dengan kata-kata tertulis dan lisan. karena hasil penelitian ini berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang dikemukakan dilapangan.

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi dan peran BUMDes Mitra Sejahtera dalam kehidupan masyarakat sudah terlihat, namun belum bisa berjalan dengan optimal, karena program desa yang sudah ada dan yang sudah berjalan belum bisa mencakup semua masyarakat. Desa payaman dan BUMDes sudah berupaya untuk melakukan dan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Program-program yang di kelola oleh BUMDes Mitra Sejahtera adalah kepala Unit, Budidaya Lele, Pengambilan Sampah, Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Pasar Desa, Pengelolaan Parkir, Kebutuhan Pemakaman, Simpan Pinjam. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada partisipasi masyarakat dengan adanya BUMDes yang sangat kurang dan tidak antusias meskipun dari pemerintahan desa sudah berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan partisipasi masyarakat yang saya teliti sangat mendukung dan berantias

dengan adanya BUMDes yang di dirikan oleh pemerintahan desa.

Kelima, karya jurnal ilmiah oleh Dida Rahmadanik yang berjudul “peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pembrdayaan masyarakat Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Pacitan”. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sehingga memusatkan pada pemecahan masalah yang ada sekarang. Data kualitatif ini berwujud kata-kata bukan merupakan rangkaian angka, yang telah dikumpulkan melalui cara observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman dan selanjutnya di proses melalui pencatatan, pengetikan. Data yang didapat berupa data primer sekunder yang peneliti dapat dari pelaku usaha di Desa Cokrokembang dan pemerintah desa. Sedangkan data sekunder peneliti diperoleh dari arsip BUMDes yang ada di Desa Cokrokembang.

Hasil dari penelitian mengenai peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat desa Cokrokembang masih belum maksimal, karena pemerintahan desa dan pengurus BUMDes belum dapat mengemabangkan UKM maupun Peran BUMDes yang sudah ada sejak tahun 2014 masih dianggap mati, karena pada awal pembentukan BUMDes pengurus masih memfokuskan kepada usaha simpan pinjam. Namun sampai saat ini modal masih berhenti di masyarakat, dan

pengurus belum berhasil mengembalikan modal yang berhenti di peminjaman. Jika penelitian ini Usaha dari BUMDes hanya berfokus pada usaha simpan pinjam saja, namun penelitian saya kali ini, usaha-usaha yang ditangani oleh BUMDes bukan hanya satu melainkan ada banyak unit usaha yang dikelola oleh BUMDes salah satunya adalah usaha pariwisata.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya Kirk dan Miller (1986:9) mendefinikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental berguna dengan pengamatan pada manusia dalam kawasanya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam perisilahnya (Moleong 1993:3). Deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis baik objek, subjek, atau fakta secara empiris tanpa manipulasi dengan tujuan mendeskripsikan karakteristik objek yang dituju.

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan dengan konsep yang jelas berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang diamati. Tujuannya supaya tidak terjadi interpretasi yang salah atau keliru dengan variabel tersebut (Rianse, 2012: 225). Berikut definisi konseptual dari judul penelitian kualitatif ini yaitu pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas desa.

Pemberdayaan masyarakat bisa diartikan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan disegala bidang dan sektor kehidupan. Komunitas(*Comunity*) berasal dari bahasa latin *comunitate* atau *communia* yang berarti memperkuat. Komunitas desa adalah persatuan, persaudaraan, kumpulan, masyarakat di sebuah desa, sebuah kota, atau sebuah bangsa.

3. Sumber Data

Sumber data yang di pakai dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2013: 308). Data primer dikumpulkan oleh

peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Data primer ini berupa opini, subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian (Purhantara, 2010: 79). Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi sumber data primer adalah direktur BUMDes Tirta Mandiri, pengelola BUMDes Tirta Mandiri, Kepala Desa Ponggok, Masyarakat Desa Ponggok, pengunjung Umbul Ponggok.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi (Sugiono, 2013:308). Penunjang data sekunder berasal dari buku tentang Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri, laporan dandokumen-dokumen dari BUMDes Tirta Mandiri, dokumentasi kegiatan lapangan, jurnal skripsi atau internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti (Harbani, 2012: 131). Tujuan observasi adalah mencari gambaran-gambaran kehidupan sosial. Dalam penelitian, observasi ini dilakukan untuk memperoleh

data tentang kegiatan-kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat terhadap BUMDes desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, keadaan masyarakat desa Ponggok, dokumentasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong 1993:135).

Wawancara merupakan salah satu tehnik pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subyek penelitian dan responden. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengotruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang di lakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (Wahyu 2010:80). Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih banyak dan mendalam mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas desa (studi terhadap BUMDes Tirta Mandiri desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten). Wawancara ini dilakukan kepada pemerintahan desa

Ponggok, pengelola BUMDes Tirta Mandiri, Masyarakat desa Ponggok.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan data yang berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Adapun data yang bisa diperoleh yaitu dengan mencari data, atau informasi buku-buku, catatan-catatan, gambar, biografi, dll. Yang data itu berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa Ponggok melalui BUMDes Tirta Mandiri. Dalam hal ini data bisa diperoleh dari pemerintahan desa Ponggok, pengelola BUMDes, meliputi foto-foto kegiatan dan keadaan masyarakat Ponggok.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiono, 2009: 89). Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam

periode tertentu. Proses analisis data yang dilakukan dalam tahapan:

- a. Reduksi Data*, yaitu merangkum, memilih hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam reduksi ini peneliti selalu berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian.
- b. Display Data*, yaitu penyajian data penelitian dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat narasi dan bentuk penyajian data yang lain sesuai dengan sifat data itu sendiri.
- c. Konklusi dan Verifikasi*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi yang disandarkan pada data dan bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan yang diambil itu kredibel (Sugiono, 2013: 343).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata (Zubaedi, 2013: 24)

Pemberdayaan atau pemberkuasaan berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Karena, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan (Suharto, 2014: 57). Menurut Karl Mark dalam buku Ilyas Supena pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum *powerles* untuk memperoleh

surplus value sebagai hak nomatifnya (Supena, 2017: 32).

Pemberdayaan merupakan langkah untuk meningkatkan peran aktif masyarakat serta berupaya untuk menggali potensi akan sumber daya yang ada. Pemberdayaan merupakan makna membuat orang menjadi berdaya. Istilah lain untuk pemberdayaan adalah penguatan atau empowerment, dimana kekuatan tersebut berasal dari diri sendiri yang digunakan untuk mendorong terjadinya perubahan, sehingga pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.

Sumodiningrat berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) jalur yaitu:

- a. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (Enabling)
- b. Memperkuat potensi daya yang dimiliki masyarakat (Empowering)
- c. Memberikan perlindungan (Protecting) (Supena, 2017:35).

Pemberdayaan masyarakat biasa dipahami atau diartikan sebagai proses mengembangkan,

memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Adapula pihak lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama padasebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya,

Istilah “pemberdayaan masyarakat” sebagai terjemahan dari kata “*empowerment*” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” sejak digulirkannya Program Inpres No. 5/1993 yang kemudian lebih dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak itu, istilah pemberdayaan dan pengentasan-kemiskinan merupakan “saudara kembar” yang selalu menjadi topik dan kata kunci dari upaya pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep dasar yang menggaris bawahi sejumlah istilah yang telah digunakan sejak lama seperti *community*

resource development, rural areas development, community economic development, rural revitalition, dan community based development.

Beberapa pakar berpandangan bahwa pengembangan masyarakat dapat membantu menanggulangi masalah dan isu-isu penting untuk kesejahteraan komunitas (masyarakat) secara konvensional oleh pemerintah dan pihak lainya secara aktif. Istilah pengembangan masyarakat telah digunakan secara internasional dalam arti sebagai proses, yakni semua usaha swadaya masyarakat digabungkan dengan usaha-usaha pemerintah setempat guna meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, kultural serta untuk meningkatkan kondisi masyarakat yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan memberikan kesempatan yang memungkinkan masyarakat tersebut membantu secara penuh pada kemajuan dan kemakmuran bangsa (Fredian 2014: 29-30). Salah satu bentuk dari aktualisasi pemberdayaan masyarakat tercermin dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari proses pengambilan

keputusan, pelaksanaan dan menikmati hasil (Soetomo 2013: 406).

Fokus pemberdayaan adalah individu dan komunitas (*community*). Pemberdayaan individu diartikan sebagai proses untuk meningkatkan kemampuan individu dalam berfikir, berperilaku, bertindak, bekerja dan membuat keputusan dengan caranya sendiri (bukan hanya pemenuhan kebutuhan dasar saja) sedangkan, pemberdayaan terhadap komunitas diartikan sebagai “*worthy of the best we human have to offer*”. Konteks individu sebagai sasaran pemberdayaan perlu dimaknai baik secara khusus yaitu perseorangan maupun secara umum yaitu keluarga. Sedangkan komunitas, sebagai sasaran pemberdayaan juga perlu dimaknai baik secara khusus yaitu kelompok masyarakat tertentu maupun seluruh warga masyarakat tanpa harus membedakan strata dan status sosial (Anwas, 2014: 142).

Pemberdayaan yang harus berawal dari setiap individu (rumah tangga) sampai ke komunitas perlu mencakup:

- a. Pemberdayaan sosial ekonomi, yaitu difokukan pada upaya menciptakan akses bagi setiap rumah tangga dalam proses produksi, seperti akses terhadap informasi, akses terhadap pengetahuan dan keterampilan, akses dalam berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses pada sumber-sumber keuangan.
- b. Pemberdayaan politik, yaitu difokuskan pada upaya untuk menetapkan akses bagi setiap rumah tangga kedalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depannya. Pada pemberdayaan politik masyarakat tidak hanya sebatas pemilihan umum saja, tetapi juga kemampuan dalam mengemukakan pendapat, melakukan kegiatan kolektif, atau bergabung dalam berbagai kegiatan asosiasi politik, seperti partai politik, gerakan sosial atau kelompok kepentingan.
- c. Pemberdayaan psikologis, yaitu difokuskan pada upaya membangun kepercayaan diri bagi setiap rumah tangga yang lemah. Kepercayaan diri pada hakikatnya merupakan hasil dari

proses pemberdayaan sosial ekonomi dan pemberdayaan politik (Anwas, 2014: 143).

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat pada intinya adalah segala ikhtiar maksimal dengan mengarahkan segala potensidan kemampuan yang bertujuan untuk:

- a. Menciptakan kondisi hingga semua orang (yang lemah) dapat menyumbangkan kemampuan secara maksimal untuk mencapai tujuan.
- b. Meningkatkan harkat dan martabat masyarakat.
- c. Memampukan dan memandirikan masyarakat(Khairin dkk, 2014:54).

Menurut Habib Soleh tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah terjadinya proses perubahan menuju mutu kehidupan yang lebih baik dan mandiri. Proses perubahan tersebut perlu direncanakan sedemikian rupa melalui berbagai tahapan yang sistematis, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Soleh, 202 :94). Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang seharusnya di maknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri.

Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, merumuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik dengan pengarah sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut (Supena, 2017: 37).

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal, maupun karena kondisi eksternal. Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis

- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, remaja, penyandang cacat, gay dan lasbian.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga(Suharto, 2014:60).

Apabila kita ingin membuat hasil pembangunan pedesaan lebih merata, maka strategi pembangunan yang partisipatif perlu dikembangkan. Untuk mencapai tujuan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Menyangkut persepsi aparaturnya terhadap kedudukan rakyat pedesaan dalam proses pembangunan. Rakyat hanya dianggap hanya sebagai sumber energi, bukan sumber informasi. Mereka digerakan untuk mendukung pembangunan yang direncanakan oleh negara, sering kali tanpa dimintai pendapat.
- b. Perubahan makna dan fungsi kekuasaan tidak hanya berarti hanya untuk mengatur saja, akan tetapi juga berarti membantu masyarakat dalam memecahkan problem-problem

pembangunan yang tidak dapat mereka pecahkan sendiri.

- c. Meninggalkan persepsi masyarakat yaitu bahwa sistem panutan adalah ciri khas masyarakat pedesaan. Perubahan persepsi tentang sistem panutan yang seolah-olah masyarakat tidak memiliki pendapat dan aspirasi sendiri di luar pendapat dan aspirasi “panutan” mereka.
- d. Perlu adanya persepsi baru yaitu bahwa desa-desa di Indonesia sangat pruralitas sifatnya baik dari segi ekologis dan adat-istiadatnya.
- e. Kelompok miskin tidak lagi dipersepsikan sebagai kelompok tidak produktif, karena walaupun kelompok ini miskin materi, tetapi mereka tidak miskin dalam hal pengalaman pembangunan, seperti kemampuan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mereka hadapi, bahkan mereka memiliki jiwa kewiraswastaan dan ketrampilan teknis untuk mengatasi problema yang mereka hadapi (Loekman 1995: 251-252).

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesaksian, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2014: 58).

3. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Indikator dalam keberdayaan masyarakat yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program-program pemberdayaan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Berkurangnya jumlah penduduk yang miskin
- b. Berkembangnya sebuah usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin di sekitar ligkungannya

- c. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya
- d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota atau kelompok, semakin kuatnya permodalan kelompok, semakin rapi tatanan administrasi kelompok, dan semakin luasnya interaksi kelompok satu dengan kelompok lain di dalam masyarakat
- e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosialnya (Sumodiningrat, 1999: 134).

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan empat kekuatan dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan dalam

(power within), kekuasaan untuk (power to), kekuasaan atas (power over), dan kekuasaan dengan (power with).

Hal tersebut sesuai dengan yang dipaparkan oleh Mardikanto (2013: 290) mengembangkan beberapa indikator keberdayaan yang mereka sebut dengan istilah *empowerment indeks* atau indeks pemberdayaan yaitu:

- a. Kebebasan mobilitas yaitu kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya seperti, seperti pergi ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari (bers, minyak tanah, minyak goreng, bumbu) kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, shampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini

terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri.

- c. Kemampuan membeli komoditas besar yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator diatas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa menerima ijin pasanganya. Terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga yaitu mampu membuat keputusan-keputusan keluarga, misalnya, mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga yaitu responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia

tanpa ijinya, yang melarang mempunyai anak atau melarang bekerja di luar rumah.

- f. Kesadaran hukum dan politik mengetahui nama salah satu seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes. Seorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri-istri yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil, penyalahgunaan bantuan sosial, atau penyalahgunaan polisi dan pegawai pemerintah.
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga yaitu memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-

aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasanganya (Suharto, 2014: 63).

4. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan sebuah “proses menjadi”. Karena pemberdayaan masyarakat sebagai proses menjadi, maka pemberdayaan merupakan salah satu langkah dimana lembaga merupakan kegiatan pemberdayaan terhadap komunitas atau masyarakat disekitarnya (Muslim, 2012: 33). Proses pemberdayaan dimaknai sebagai serangkaian aktivis atau kegiatan yang dilakukan secara kronologis sistematis yang berupaya untuk mengubah masyarakat yang pada awalnya memiliki yang kurang berdaya menjadi masyarakat yang lebih berdaya. Proses ini akan merujuk pada sebuah tindakan yang nyata dan dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, yang meliputi pengetahuan, sikap, dan perilaku menuju pada penguasaan dan ketrampilan yang baik (Pratama, 2016: 3).

Pemberdayaan secara umum diaktualisasikan dalam beberapa tahapan

manajemen melalui dari perencanaan, pengkoordinisasian, dan pengembangan berbagai langkah penanganan program dan proyek leasyarakatan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dibutuhkan beberapa langkah secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan warga yang menjadi sasaran kegiatan. Tahap-tahap pemberdayaan meliputi:

- a. Tahap *problem posing* (pemaparan masalah) yang dilakukan aktivis untuk mengelompokkan dan menentukan masalah-masalah dan persoalan-persoalan yang dihadapi warga dari kelompok sasaran.
- b. Tahap *problem analysis* (analisis masalah). Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi mulai dari jenis, ukuran, dan ruang lingkup permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga dan membuat informasi tersebut dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- c. Tahap penentuan tujuan dan saran. Tujuan menunjuk pada visi, tujuan jangka panjang, dan *statement* tentang petunjuk umum.

Sementara sasaran bersifat lebih khusus dibandingkan tujuan. Sasaran yang ditetapkan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang dapat diidentifikasi, dianalisis dan diungkap secara jelas kepada warga.

- d. Tahap *action plans* (perencanaan tindakan) tahap ini dilakukan dengan kegiatan perencanaan berbagai aksi untuk mencapai tujuan. Dalam melakukan aksi harus memperhatikan tenaga kerja, peralatan, jaringan sosial, dana, tempat, informasi, waktu tersedia, faktor-faktor penghambat, faktor-faktor pendukung dan pihak-pihak yang berpengaruh.
- e. Tahap pelaksanaan kegiatan. Tahap ini dilakukan dengan cara mengimplementasikan langkah-langkah pemberdayaan masyarakat yang telah dirancang. Dalam tahap ini pemberdaya dituntut untuk menghitung konsekuensi yang timbul sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan.
- f. Tahap evaluasi. Tahap ini dilakukan secara terus menerus baik secara formal atau semi formal pada akhir suatu proses pengembangan

masyarakat maupun secara informal dalam setiap bulan, mingguan bahkan harian (Zubaedi, 2013: 84).

Memberdayakan masyarakat memerlukan rangkaian proses yang panjang (tidak seketika), agar mereka menjadi lebih berdaya. Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong sosial ekonomi politik. Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai *power* dalam pencapaian tujuan yaitu mengembangkan diri.

Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan yang dapat disingkat menjadi 5P.

- a. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat kultural dan sktruktural yang menghambat
- b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi

kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka

- c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dengan yang lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok yang lemah
- d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan
- e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang

memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha (Alfitri, 2011: 26-27).

Menurut Tampolon, dalam buku Zubaedi (2013: 77) proses pemberdayaan masyarakat meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. *Getting to know the local community* yaitu mengetahui karakteristik masyarakat setempat yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.
- b. *Gathering knowledge about the local community* yaitu mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengumpulan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, seks, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuana tentang nilai, sikap, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.

- c. *Identifying the local* yaitu pemberdayaan masyarakat akan sia-sia jika tidak diperoleh dukungan dari pimpinan/ tokoh masyarakat setempat. Untuk itu faktor “*the local leaders*” harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang sangat kuat didalam masyarakat.
- d. *Stimulating the community to realize that is has problems* masyarakat yang terikat adat istiadat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Oleh karena itu masyarakat perlu adanya pendekatan persuasif untuk menyadarkan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu di penuhi.
- e. *Helping people to discus their problem* memberdayakan masyarakat berarti merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahanya dalam suasana kebersamaan.
- f. *Helping people to identify most pressing problem* masyarakat perlu diberdayakan agar

mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.

- g. *Fostering self-confidence* yaitu tujuan utama pemberdayaan adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri masyarakat merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.
- h. *Deciding on a program action* yaitu masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan.
- i. *Recognition of strength and resources* yaitu memberdayakan masyarakat berarti memberi tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan. Program action tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, tinggi. Tentunya dengan program skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan.

- j. *Helping people to continue to work on solving their* yaitu pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalah secara kontinu.
- k. *Increasing people's ability for self-help* yaitu salah satu tujuan pemberdayaan masalah adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat yaitu mampu menolong diri sendiri. Untuk itu perlu diingatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

Pemberdayaan merupakan upaya membangun kemampuan masyarakat dan memberdayakan sumber daya manusia yang ada melalui pengembangan kelembagaan, sarana pra sarana serta pengembangan tiga-P (pendampingan, penyuluhan, pelayanan). Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total msyarakat, penyuluhan dapat merespon memantau perubahan yang terjadi di masyarakat, dan pelayanan yang berfungsi sebagai unsur pengendali ketetapan

distribusi aset sumber daya fisik dan non fisik yang diperlukan masyarakat (Zubaedi 2013:77-76).

5. Metode Pemberdayaan

Praktik pemberdayaan masyarakat, terdapat beragam metode yang secara merinci. Pada perkembangan terakhir banyak diterapkan beragam metode pemberdayaan masyarakat “partisipatif” berupa:

a. RRA (*Rapid Rural Appraisal*)

RRA merupakan metode penilaian keadaan desa secara cepat, yang dalam praktik, kegiatan RRA lebih banyak dilakukan oleh “orang luar” dengan tanpa atau sedikit melibatkan masyarakat setempat. Tentang hal ini, Chambers (1980) menyatakan bahwa dibanding teknik-teknik yang lain, RRA merupakan teknik penilaian yang relatif “terbuka, cepat, dan bersih” dibanding dengan teknik yang “cepat dan kotor” berupa sekedar kunjungan yang dilakukan secara singkat oleh seorang ahli dari kota. Di pihak lain RRA dinilai lebih efektif dan efisien dibanding dengan teknik yang “lama dan

kotor” yang dilakukan melalui kegiatan survei oleh tenaga profesional yang dipersiapkan melalui pelatihan khusus.

Sebagai suatu teknik penilaian, RRA menggabungkan beberapa teknik yang terdiri dari:

- 1) Review/telaah data sekunder, termasuk peta wilayah dan pengamatan lapangan secara ringkas
- 2) Observasi/ pengamatan lapangan secara langsung
- 3) Wawancara dengan informan kunci dan lokakarya
- 4) Pemetaan dan pembuatan diagram/grafik
- 5) Studi kasus, sejarah lokal, dan biografi
- 6) Kecenderungan, kecenderungan
- 7) Pembuatan kuersioner sederhana yang singkat
- 8) Pembuatan laporan langsung secara cepat.

Bahaya dari pelaksanaan RRA adalah, seringkali apa yang dilakukan oleh Tim RRA bahwa mereka telah melakukan melalui kegiatan pengamatan dan bertanya langsung

kepada informan yang terdiri dari warga masyarakat setempat.

b. PRA (*Participatory Rapid Appraisal*) atau Penilaian Desa secara Partisipatif.

PRA dilakukan dengan lebih banyak melibatkan “orang dalam” yang terdiri dari semua *Stakeholders* (pemangku kepentingan kegiatan) dengan difasilitasi oleh orang luar yang lebih berfungsi sebagai “narasumber” atau fasilitator dibanding sebagai instruktur atau guru yang “menggurui”.

PRA merupakan metode penelitian keadaan secara partisipatif, yang dilakukan pada tahapan awal perencanaan kegiatan. Kegiatan yang dilakukan oleh PRA adalah:

- 1) Pemetaan wilayah dan kegiatan yang terkait dengan topik penilaian keadaan
- 2) Analisis keadaan.
- 3) Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling layak atau dapat diandalkan (dapat dilaksanakan,

efisien, dan diterima oleh sistem sosialnya)

- 4) Rincian tentang *stakeholders* dan peran yang diharapkan dari para pihak, serta jumlah dan sumber-sumber pembiayaan yang dapat diharapkan untuk melaksanakan program/ kegiatan yang akan diusulkan/direkomendasikan

c. FGD (*Fokus Group Discussion*) atau Diskusi Kelompok terarah

FGD merupakan interaksi individu-individu (sekitar 10-30 orang) yang tidak saling mengenal oleh seorang pemandu (moderator) diarahkan untuk mendiskusikan pemahaman dan pengalamannya tentang sesuatu program atau kegiatan yang diikuti dan dicermati.

Pelaksanaan FGD dirancang sebagai diskusi kelompok terarah yang melibatkan semua pemangku kepentingan suatu program, melalui diskusi yang partisipatif dengan di pandu atau difasilitasi oleh seorang pemandu dan seringkali juga mengundang narasumber.

d. PLA (*Participatory Learning And Action*),
Proses Belajar dan Praktik secara Partisipatif

PLA merupakan metode pemberdayaan yang terdiri dari proses belajar (melalui: ceramah, curah pendapat, diskusi, dll.) setelah itu diikuti dengan aksi atau kegiatan secara riil yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut.

Manfaat metode PLA adalah sebagai berikut:

- 1) Segala sesuatu yang tidak mungkin dapat dijawab oleh “orang luar”
- 2) Masyarakat setempat akan memperoleh banyak pengetahuan yang berbasis pada pengalaman yang dibentuk dari lingkungan kehidupan mereka yang sangat kompleks
- 3) Masyarakat akan melibatkan warga setempat lebih mampu untuk mengemukakan masalah solusi yang tepat dibanding orang luar
- 4) Melalui PLA, orang luar dapat memainkan peran penghubung antara

masyarakat setempat dengan lembaga lain yang diperlukan. Disamping itu, mereka dapat menawarkan keahlian tanpa harus memaksakan kehendaknya.

e. SL atau Sekolah Lapang

SL merupakan sebuah kegiatan pertemuan berkala yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat pada hamparan tertentu, yang diawali dengan membahas masalah yang sedang dihadapi, kemudian diikuti dengan curah pendapat, berbagi masalah, tentang alternatif dan pemilihan cara pemecahan masalah yang paling efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya yang di miliki (Mardikanto, 2015: 199-204).

f. Metode Pelatihan Partisipatif

Metode pelatihan partisipatif menekankan pentingnya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Intensitas hubungan antara fasilitator dengan kelompok sasaran yang tidak bersifat vertikal tetapi bersifat horizontal.

- 2) Lebih mengutamakan proses dari pada hasil, maksudnya keberhasilan pelatihan tidak diukur berdasarkan seberapa banyak terjadi alih pengetahuan, tetapi seberapa jauh telah terjadi interaksi atau diskusi dan berbagai pengalaman diantara sesama peserta maupun antara peserta dengan fasilitator (Soleh, 2014: 104).

B. Komunitas

1. Pengertian Komunitas

Kata komunitas (*community*) berasal dari bahasa latin *communitate* atau *communia* yang berarti memperkuat. Dan kata ini, dibentuk istilah komunitas yang artinya persatuan, persaudaraan, kumpulan, masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, istilah komunitas atau *community* dapat diterjemahkan sebagai “masyarakat setempat”. Istilah yang merujuk pada warga sebuah desa, sebuah kota, atau sebuah bangsa (Mahmud, 2015:150).

Komunitas (*communiy*) dalam perspektif sosiologi adalah warga setempat yang dapat

dibedakan dari masyarakat lebih luas (*society*) melalui kedalaman bersama atau oleh tingkat interaksi yang tinggi. Anggota komunitas mempunyai kebutuhan bersama, jika tidak ada suatu kebutuhan bersama itu bukan suatu komunitas (Fredian, 2015: 3). *Community* juga dapat diterjemahkan sebagai “masyarakat setempat”. Yang menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku, atau bangsa. Apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok-kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama kelompok itu disebut dengan masyarakat setempat. Sebagai perumpamaan, kebutuhan seorang tidak mungkin secara keseluruhan akan terpenuhi apabila dia hidup bersama rekan lain yang sesuku (Soekanto, 2015: 129).

Istilah komunitas biasanya digunakan ke dalam bentuk komunitas desa (*rural*) dan kota (*urban*). Pada awalnya, dua komunitas ini dibedakan berdasarkan jumlah dan pekerjaan. Desa

sering diidentifikasi dengan jumlah penduduk kecil dan bekerja di sektor pertanian, sedangkan kota dengan jumlah penduduk besar yang bekerja disektor industri dan perdagangan. Transportasi modern telah mengikis batas antara desa dan kota, sehingga secara perlahan-lahan adanya persamaan, bukan lagi sebagai tipe komunitas yang masing-masing berbeda (Syarbani, 2016: 91).

Memberdayakan komunitas desa satu masalah tersendiri yang berkaitan dengan hakikat dari power, serta hubungan antar individu dan kelompok memiliki daya. Akan tetapi kadar daya itu akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait antara lain seperti pengetahuan, kemampuan, status, dan gender. Faktor-faktor yang saling berkait itu pada akhirnya membuat hubungan dengan subyek (penguasa) dan obyek (yang dikuasai). Bentuk relasi sosial yang dicirikan dengan dikotomi subyek dan obyek tersebut merupakan relasi yang ingin “diperbaiki” melalui proses pemberdayaan.

Pemberian kekuasaan, kebebasan, dan pengakuan dari subyek dan objek dengan memberinya kesempatan untuk meningkatkan kehidupan dengan memakai sumber daya tersebut. Pada akhirnya, kemampuan individu miskin untuk dapat mewujudkan harapannya dengan diberinya pengakuan oleh masyarakat yang merupakan bukti bahwa individu dan kelompok tersebut memiliki daya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka secara operasional, pemberdayaan pada tahap ini bergerak dari pemahaman isi dimensi generatif, yang merupakan suatu proses perubahan dengan menempatkan kreativitas dan prakarsa warga komunitas yang sadar diri dan terbina sebagai titik tolak. Dalam konteks ini, yang berorientasi memperkuat kelembagaan komunitas, maka pemberdayaan warga komunitas merupakan tahap awal untuk menuju kepada partisipasi warga komunitas. Khususnya dalam pengambilan keputusan untuk menumbuhkan kemandirian komunitas. Dengan kata lain, pemberdayaan

dilakukan agar warga komunitas mampu berpartisipasi untuk mencapai kemandirian.

Kemampuan warga komunitas berpartisipasi diharapkan komunitas dapat mencapai kemandirian, yang dapat dikategorikan sebagai kemandirian material, kemandirian intelektual, dan kemandirian manajemen. kemandirian material tidak sama dengan konsep mencukupi kebutuhan sendiri. Kemandirian material adalah kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan materi dasar serta cadangan dan mekanisme untuk dapat bertahan pada waktu krisis. kemandirian intelektual merupakan pembentukan dasar pengetahuan otonom oleh masyarakat yang memungkinkan mereka menanggulangi bentuk-bentuk dominasi yang lebih halus yang muncul di luar kontrol oleh pengetahuan itu. Sedangkan kemandirian manajemen adalah kemampuan otonom untuk membina diri dan menjalani serta mengelola kegiatan kolektif agar ada perubahan dalam situasi kehidupan mereka (Ferdian, 2015: 92-96).

2. Jenis Komunitas

Jenis komunitas dibagi menjadi 4 yaitu:

a. Komunitas Pedesaan

Dalam definisi ini tidak ada penegasan bahwa komunitas desa berkaitan secara khusus atau tergantung pada pertanian (desa pertanian). Ini berarti bahwa definisi tersebut juga mencakup desa nelayan dan bentuk-bentuk pemukiman (kecil) menetap lainnya (Rahardjo, 2017:29). Menurut Fathuri dalam buku Teori sosiologi suatu pengantar, komunitas desa secara umum adalah mendiami suatu wilayah dalam jangka yang panjang karena memiliki dua prinsip penting yaitu prinsip genealogi dan relasi sosial yang kuat. Sebagaimana dikutip dari Koentjaraningrat, bahwa masyarakat desa mengikat diri menjadi suatu persekutuan hidup dan kesatuan sosial didasari oleh dua prinsip penting yaitu prinsip hubungan genealogis dan prinsip hubungan tinggal dekat/teritorial (Syarbani, 2016: 92).

Komunitas desa tidak selalu sama, adabeberapa ciri—ciri tradisional kehidupan

desa menurut Horton (1984: 130-32) yaitu seperti berikut:

- 1) Komunitas desa-kota kecil dengan lahan pertanian yang luas tersebar di sekitar pusat desa.
- 2) Komunitas desa-terbuka yang tidak memiliki pusat desa.
- 3) Komunitas desa dengan tipe nelayan, pertambangan dan sejenisnya.
- 4) Desa bergaris lurus dengan rumah-rumah yang berdiri sepanjang jalan ladang pertanian yang panjang dan sempit, seperti desa transmigrasi.
- 5) Komunitas desa perkebunan, seperti perkebunan teh, karet, dan lainnya milik negara.

b. Komunitas perkotaan

Max weber berpendapat bahwa komunitas kota adalah suatu tempat di sebut kota apabila penduduk atau masyarakatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Sedangkan haris dan Ulman berpendapat kota merupakan suatu

pusat dari pemukiman dan pemanfaatan bumi oleh manusia. Kota-kota sekaligus merupakan paradoks. Pertumbuhannya cepat dan luasnya kota-kota menunjukkan keunggulan dalam mengeksploitasi bumi.

Pertumbuhan kota mengalami perubahan yang revolusioner, dengan ciri-ciri:

- 1) Pembagian kerja ke dalam beberapa bidang pekerjaan khusus
- 2) Organisasi sosial berdasarkan bidang pekerjaan dan kelas sosial, bukan berdasarkan sistem kekerabatan
- 3) Lembaga pemerintah formal yang berdasarkan batas wilayah, bukan berdasarkan sistem kekeluargaan
- 4) Sistem perdagangan dan dunia usaha
- 5) Sarana komunikasi dan administrasi
- 6) Teknologi rasional

Perkembangan ini berlangsung secara terus menerus seiring dengan pertumbuhan kota-kota kecil (*town*) menjadi kota-kota besar (mitropolitan) (Syahril, 2016:93).

Dalam mengadakan klasifikasi masyarakat setempat, dapat digunakan empat kriteria yang saling berpautan yaitu:

- 1) Jumlah penduduk
 - 2) Luas, kekayaan dan kepadatan penduduk daerah kedalaman
 - 3) Fungsi-fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat
 - 4) Organisasi masyarakat yang bersangkutan
- (Soekanto, 2015:132)

3. Ciri-ciri Komunitas

Komunitas dimengerti sebagai suatu bentuk organisasi sosial dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a. Skala Manusia

Sebagai lawan dari struktur yang besar, tidak bersifat pribadi dan terpusat, komunitas melibatkan interaksi-inteaksi pada suatu skala yang mudah dikendalikan dan digunakan oleh individu-individu. Struktur-struktur itu berukuran cukup kecil sehingga mampu memiliki dan mengendalikannya, yang dengan

itu mampu membuka pintu bagi pemberdayaan yang jujur.

b. Identitas dan kepemilikan

Komunitas tersebut mampu memberikan rasa identitas kepada seseorang, dapat menjadi bagian dari konsep diri seorang, dan merupakan sebuah aspek yang penting dari bagaimana seorang memandang tempatnya di dunia. Tidak adanya sebuah identitas seperti itu biasanya dianggap sebagai salah satu masalah masyarakat modern. Berkurangnya lembaga-lembaga yang dapat memberikan identitas kepada seorang dapat dilihat sebagai salah satu sebab pekerjaan dan tempat-tempat telah menjadi demikian pentingnya. Hal tersebut mewakili salah satu dari sedikit cara yang tersisa bagaimana orang dapat secara sah mendapatkan identitas, dan pekerjaan yang telah menjadi mekanisme primer atau alokasi status.

c. Kewajiban-kewajiban

Keanggotaan sebuah organisasi membawa baik hak maupun tanggung jawab, dan sebuah komunitas juga menuntut kewajiban tertentudari anggotanya. Terdapat harapan bahwa orang akan berkontribusi kepada kehidupan ‘kehidupan komunitas’ dengan berpartisipasi dalam paling sedikit dari kegiatan-kegiatannya, bahwa mereka akan berkontribusi kepada pemeliharaan struktur komunitas.

d. *Gemeinschaft*

Sebuah komunitas akan memungkinkan seorang berinteraksi dengan sesamanya alam keragaman peran yang lebih besar, yang peran-peran tersebut kurang dibeda-bedakan dan bukan berdasarkan kontrak, dan yang mendorong interaksi-interaksi dengan yang lain sebagai “seluruh warga” ketimbang sebagai peran atau kategori yang terbatas dan tetap. Hal ini tidak hanya penting dalam pengertian pengembangan diri, kontak antar manusia dan pertumbuhan pribadi, ia juga

memungkinkan individu-individu untuk menyumbangkan berbagai bakat dan kemampuan untuk keuntungan yang lain dan komunitas tersebut sebagai suatu keseluruhan.

e. Kebudayaan

Komunitas ini menyediakan sebuah kesepakatan bagi suatu penangkal terhadap fenomena 'kultur masal'. Kebudayaan masyarakat modern diproduksi dan dikonsumsi pada tingkat masal, yang terlalu sering mengakibatkan keseragaman yang steril dan pemindahan kultur dari pengalaman lokal dari orang-orang biasa (Ife, 2008:91-93).

Soekanto (1990), juga berpendapat bahwa komunitas (masyarakat) mempunyai ciri-ciri:

- a. Manusia yang hidup bersama, secara teoritis berjumlah minimal dua orang
- b. Manusia-manusia tersebut bergaul dan hidup bersama selama jangka waktu yang cukup lama
- c. Mereka sadar bahwa manusia tersebut merupakan bagian dari satu kesatuan

- d. Mereka merupakan suatu sistem kehidupan bersama, yang menghasilkan kebudayaan. Maka dengan melihat ciri-ciri tersebut, tampak bahwa masyarakat itu dapat dikatakan sebagai makhluk sosial (Remiswal, 2013: 42-43).

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Desa Ponggok

1. Keadaan Geografis dan Batas Wilayah

Desa Ponggok adalah salah satu desa di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Desa Ponggok tidak mencapai angka 77,23 Ha, namun karena desa Ponggok melepaskan tanah desa sebesar 1,15 Ha kepada pihak PERUSHAAN TIV (Aqua). Desa Ponggok mendapatkan pergantian lahan seluas 7,82 Ha. Hingga saat ini luas desa Pongok mencapai 77,23 Ha dan berbatasan dengan desa Cokro, Kecamatan Tulung di sebelah utara, desa Jeblog Kecamatan Karangnom di sebelah selatan, desa Dalangan kecamatan Tulung di sebelah Barat dan desa Nganjat di Kecamatan Polanharjo di sebelah Timur.

Secara geografis, desa Ponggok ini berada di ketinggian 156 dari permukaan air laut. Dari segi monografi, desa ini berada pada daratan rendah dengan suhu udara rata-rata 32°C. Jika dilihat dari orbitasi jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan sejauh 4 Kilometer,

sedang dari pusat Pemerintahan Kabupaten berada sejauh 15 Kilometer berada sebelah utara Kota Klaten. 10 kilometer dari sebelah barat Jalan Raya Yogya-Solo.

Jarak desa Ponggok menuju ibu kota kabupaten sejauh 17 Km. Desa Ponggok terbagi menjadi 4 dukuh termasuk di dalamnya 6 RW dan 12 RT. Dukuhs tersebut yaitu Dukuhs Umbulsari, Dukuhs Kiringan, Dukuhs Ponggok, Dukuhs Jeblogan. Batas wilayah desa Ponggok yaitu:

Sebelah Utara : Desa Cokro, Kecamatan Tulung

Sebelah Timur : Desa Dalangan, Kecamatan Polanharjo

Sebelah Selatan : Desa Njeblag, Kecamatan Karanganyar

Sebelah Barat : Desa Dalangan, Kecamatan Tulung

Desa Ponggok ini berada di kaki Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Oleh sebab itu, desa ini memiliki tanah yang sangat subur dan cocok untuk lahan pertanian. Lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian pun sebesar 61,76 Ha dan bentuk sawah dan ladang. Desa Ponggok juga memiliki air yang melimpah serta memiliki beberapa mata air atau yang dikenal dengan *umbul*. Banyaknya sumber air yang terdapat di desa Ponggok membuat desa ini sistem perairan (irigasi) lengkap, mulai dari irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, irigasi

tadah hujan dan sawah pasang surut. Demi kemanfaatan perairan, desa Pongok memiliki lahan yang digunakan untuk kolam ikan seluas 15,53 Ha.

Visi Desa Pongggok

- a. Terwujudnya desa wisata ponggok yang mandiri
- b. Mampu mengelola potensi desa dan pembangunan keberlanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkualitas, berbudaya, maju, adil, demokratis, dan peduli terhadap lingkungan

Misi Desa Ponggok

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- b. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat
- d. Mengembangkan teknologi informasi
- e. Membangun infrastruktur, saran dan prasarana desa
- f. Mengembangkan seluruh potensi desa
- g. Melestarikan kearifan lokal
- h. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman
- i. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

- j. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
- k. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan strategis
- l. Mengembangkan kegiatan keagamaan

Sumber: Data RPJMDes

Struktur organisasi Desa Ponggok

Tabel 1
Struktur organisasi desa Ponggok

No	NAMA	JABATAN
1	Junaidhi Mulyono	Kepala Desa
2	Yani Setyadi	Sekretaris Desa
3	Sunarno	Kaur Pembangunan
4	Ira Hermawati	Kaur Pemerintahan
5	Sugeng Raharjo	Kaur Umum
6	Untoyo	Kepala Dusun 1
7	Sarjono	Kepala Dusun 2

Sumber Desa Ponggok Tahun 2016

2. Pemanfaatan Tata Ruang

Pemanfaatan tanah untuk pertanian di desa Ponggok lebih cenderung menghasilkan tanaman padi sawah dengan total wilayah 146 Ha, dan tanaman kelapa dengan total wilayah 1,33 Ha. Desa Ponggok juga memiliki kolam ikan dengan total luas kolam sebesar 120.783m. pemanfaatan kolam dan produksi ikan nila sebanyak 107.0999 kg dan produksi ikan bawal sebanyak 11.400 kg pada awal tahun januari 2016. Sedangkan pada Desember 2016 luas kolam mengalami penyusutan menjadi 52.550m dengan produksi ikan nila sebanyak 39.453 kg dan produksi ikan bawal sebanyak 15.200 kg.

3. Kondisi Demografi

a. Keadaan penduduk menurut jenis kelamin

Jumlah penduduk desa Ponggok terhitung sejak 2016 berdasarkan laporan monografi desa sebanyak 609 KK yang terdiri dari 2.085 orang. Seluruhnya berwarganegara Indonesia dengan jumlah laki-laki 1.4042 orang dan jumlah perempuan 1.043 orang.

Tabel 2
Jumlah penduduk Desa Ponggok menurut jenis kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.4042
2	Perempuan	1.043
	Jumlah	2.4472

Sumber: Data Monografi tahun 2016

b. Keadaan penduduk menurut umur

Keadaan penduduk menurut umur dapat dibedakan kedalam dua kelompok usia yaitu usia tertanggung dan usia kelompok usia tenaga kerja.

Tabel 3
Jumlah penduduk menurut usia kelompok tertanggung

Rentang usia (tahun)	Jumlah	Presentase (%)
0-3	102	14.39
4-6	129	18.39
7-12	281	31.31
13-15	132	11.57

16-18	158	12.55
Diatas 19	85	11.99
Total	887	100

Sumber: Data Monografi tahun 2016

Tabel 4
Jumlah penduduk menurut usia kelompok tenaga kerja

Rentang Usia (Tahun)	Jumlah	Persentase (%)
15-19	2	0.17
20-26	162	13.56
27-40	497	41.87
41-56	398	33.53
Diatas 7	139	10.87
Total	1.198	100

Sumber: Data Monografi Desa Pongkok tahun 2016

Berdasarkan usia, jumlah total warga yang masih menjalani pendidikan baik SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi adalah 887 orang dan warga yang telah menjadi kelompok kerja adalah berjumlah 1.198 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Pongkok memiliki usia non produktif.

c. Keadaan penduduk menurut agama

Setiap orang berhak memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing. Kepercayaan masyarakat di desa Pongkok ada beragam agama yaitu agama Islam, Kristen, dan Katholik. Keadaan penduduk menurut beragam adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Keadaan penduduk menurut agama

No	Agama	Jumlah penduduk
1	Islam	2024
2	Kristen	27
3	Katholik	16
4	Budha	-

Sumber: Data Monografi Desa Pongkok tahun 2016

Melihat data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk di desa Pongkok merupakan pemeluk agama Islam. Yaitu sebanyak 2024 orang memeluk agama Islam, sedangkan pemeluk agama Katholik memiliki persentasi paling sedikit dengan pemeluk 16 orang.

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Menurut Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2016, bonus demografi suatu daerah merupakan sebuah kesempatan atau peluang bagi daerah tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan produktifitas masyarakatnya. Hal inilah yang terjadi di desa Ponggok, Pemerintah desa Ponggok sangat memanfaatkan bonus demografi itu. Kelompok yang telah bekerja sebagian besar bekerja di desa Ponggok, karena Pemerintah desa Ponggok telah menyediakan beberapa lapangan pekerjaan untuk masyarakat pada BUMDes “Tirta Mandiri”. Jenis pekerjaan itupun sangat beragam. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6

Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

Jenis pekerjaan	Jumlah	Presentase
Swasta/karyawan swasta	517	42.70
Wiraswasta/pedagang	275	22.71

Buruh harian lepas	213	17.59
Tani	49	4.05
Pegawai Negeri Sipil	31	2.56
Buruh Tani	30	2.48
Pensiunan	27	2.28
Pertukangan	25	2.06
Honorar	16	1.32
Jasa	14	1.16
Dokter, perawat, bidan	9	0.74
ABRI/Kepolisian RI	5	0.41
Total	1211	100

Sumber: Data Sekunder Desa Ponggok 2016

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ponggok Tirta Mandiri

1. Profil Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri

Badan Usaha Milik Desa merupakan organisasi yang baru dan terbentuk atas dasar disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Presiden Indonesia yang ke-7 Joko Widodo berusaha membangun ekonomi lewat pinggiran. Badan Usaha Milik Desa Ponggok Tirta Mandiri merupakan salah

satu BUMDes dari sekian banyak BUMDes yang ada di Indonesia. BUMDes ini bergerak memanfaatkan aset-aset desa. Aset desa yang dimiliki oleh BUMDes berupa sumber mata air, tanah yang subur, dan kearifan lokal. BUMDes ini pada awalnya hanya berbentuk koperasi.

Berdasarkan undang-undang dan peraturan tersebut, maka munculah ide gagasan dari Kepala desa Ponggok Bapak Junaedi Mulyono melalui msyawarah desa sebagai wujud melembagakan demokrasi dengan memepertemukan BPD, Pemerintah desa, dan kelompok masyarakat untuk membahas cara yang strategis salah satunya adalah dalam mendirikan BUMDes. Pendirian BUMDes pada dasarnya adalah membangun tradisi suatu masyarakat di desa untuk mencapai derajat ekonomi masyarakat desa yang lebih tinggi lagi. Dengan berbekal inventarisasi potensi yang di miliki oleh desa, forum musyawarah menggunakan praktik *deliberative democracy* untuk menyepakati gagasan pengelolaan dan pemanfaatan aset aset desa melalui BUMDes. Dengan pertimbangan yang matang Pemerintah Desa Ponggok mendirikan BUMDes

pada tanggal 15 Desember 2009 berdasarkan keputusan yang dituangkan dalam peraturan Desa No 06 Tahun 2009 dengan nama BUMDes Tirta Mandiri.

Adanya potensi yang sangat besar ini, Bapak Junaedi Mulyono selaku Kepala Desa pada tahun 2009 langsung mempunyai inovasi untuk mendirikan Badan Usaha pengelolaan sumber aset desa untuk dijadikan modal kekayaan desa. Dalam hal ini pemerintahan desa mengajak kerjasama dan dukungan dengan jajaran pemerintahan desa Ponggok pada awalnya. Awal berdirinya BUMDes Tirta Mandiri ini hanya bergerak di bidang simpan pinjam saja, untuk melayani simpan pinjam kepada para petani di desa Ponggok khususnya dan kepada para masyarakat desa Ponggok pada umumnya. Sebelum adanya BUMDes desa pongok juga mendirikan pabrik air minum Aqua. Masyarakat desa Ponggok semakin meningkatkan tingkat kesejahteraannya karena PT Aqua mampu memberi porsi 40% dari jumlah karyawan untuk diisi dari pemuda-pemuda desa Ponggok yang ingin bekerja di pabrik tersebut. Namun, dengan meningkatnya

tingkat kesejahteraan semakin meningkat pula tingkat konsumsi masyarakat Ponggok. Meningkatnya tingkat konsumsi ini tidak diiringi dengan tingginya tingkat pendapatan masyarakat, sehingga memaksakan masyarakat untuk melakukan simpan pinjam kepada perorangan atau kelompok. Pada akhirnya, setelah melihat kejadian tersebut pemerintahan desa Ponggok masuk untuk memfasilitasi masyarakat untuk untuk melayani simpan pinjam agar terselamatkan dari bunga bank yang terlalu besar.

2. Visi dan Misi BUMDes Tirta Mandiri

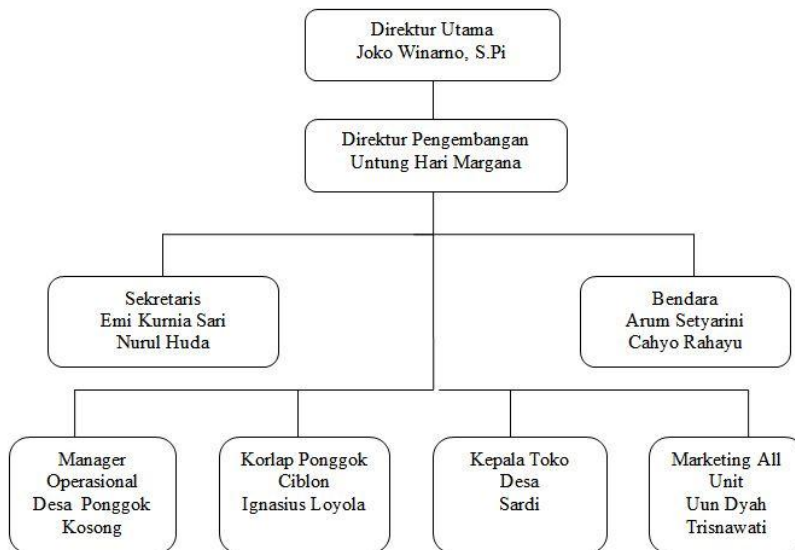
Visi dari BUMDes Tirta Mandiri yaitu menjadi desa wisata yang mandiri, mampu dalam pengelolaan potensi desa dan pengembangan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkualitas, berbudaya, maju, adil, demokratis dan peduli terhadap lingkungan.

Misi dari BUMDes Tirta Mandiri adalah:

- a. Mengembangkan aset yang ada untuk terus dapat dimaksimalkan sebagai sumber pendapatan desa yang berkelanjutan.

- b. Mampu menganalisa potensi, peluang, dan tantangan untuk menyusun rencana usaha yang mengikuti trend pasar atau menciptakan pasar baru.
- c. Pengelolaan keuangan yang sehat berikut dengan strategi perencanaan investasi yang tepat dan tingkat resiko yang rendah.
- d. Peningkatan kriteria dan kapasitas SDM BUMDes untuk dapattercapainya BUMDes yang handal dan terpercaya.
- e. Strategi promosi produk barang dan jasa efektif untuk menarik/ menumbuhkan kepercayaan investor untuk penanaman modal di BUUMDes dengan pembagian hasil yang rasional.

Struktur organisasi BUMDes Tirta Mandiri



3. Sejarah BUMDes Tirta Mandiri

Bumdes Tirta Mandiri dibentuk dengan tujuan untuk membantu masyarakat desa Ponggok yang terjatuh hutang. Pada awal 2008, terdapat beberapa mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Gajah Mada (UGM). Masyarakat ini dimintai oleh Pemerintah desa Ponggok untuk mendata penduduknya yang berpendapatan rendah dan mencatat semua masalah yang dihadapi oleh

masyarakat desa Ponggok. Berdasarkan hasil data dari mahasiswa UGM tersebut, ditemukan bahwa sebagian besar warga desa Ponggok banyak yang terjatuh hutang dengan rentenir. Berdasarkan hal itulah rencana pemerintahan desa dalam mendirikan BUMDes semakin mantap dengan tujuan untuk membantu masyarakat desa yang terjatuh hutang. Akhir tahun 2009, tepat pada tanggal 15 Desember 2009 BUMDes Tirta Mandiri resmi berdiri. Usaha pertama yang dikelola BUMDes adalah simpan pinjam. Usaha simpan pinjam ini diberikan paling utama kepada warga yang memiliki hutang.

“Dulu warga disini sebelum adanya BUMDes mereka banyak yang bekerja di Pabrik Aqua, mereka mempunyai *minsed* setelah lulus sekolah SMA akan langsung bekerja di Pabrik Aqua tersebut. Sehingga mereka sudah bisa memegang uang dengan jumlah yang banyak. Setelah itu untuk memicu datangnya rentenir maka dari Bumdes mendirikan usaha simpan pinjam. Selain itu mbak, ada juga yang masih pengangguran tidak mempunyai pekerjaan (Wawancara Bapak Joko Winarno pada tanggal 17 Juli 2019)

Setelah hutang warga itu sudah terselesaikan, sejak saat itu pemerintah desa Ponggok melarang para rentenir baik dari warga sendiri

maupun dari Bank swasta untuk masuk kedalam desa Ponggok. Selanjutnya, BUMDes Tirta Mandiri, mengelola usaha baru yaitu toko pakan ikan, dan pinjaman modal tetap dilanjutkan bagi masyarakat. Selain itu pada tahun 2010, BUMDes juga mulai membuka kegiatan pariwisata *Umbul ponggok* sebagai wahana rekreasi. Berbekal keyakinan dan kerja keras para pengurus BUMDes serta motivasi tiada henti dari kepala desa, perlahan namun pasti BUMDes mengalami pergerakan yang lebih baik. BUMDes yang baru berjalan satu tahun sudah mendapatkan menghasilkan laba sebesar Rp. 100.000.000,- di tahun 2010.

”Saya menerapkan sisem *believing is seeing* mbak, karena masyarakat sini itu tidak akan percaya kalau tidak melihat bukti secara nyata, maka dari itu saya menekuni setiap langkah untuk mewujudkan perubahan terhadap masyarakat desa ponggo. Awalnya mereka tidak percaya mbak, saya mengajak mereka pun sulit untuk Bergeraknya. Akhirny saya berfikiran seperti ini kalau bukan saya yang memulai perubahan itu terus siapa lagi? Itu yang selalu berada dalam angan saya mbak, saya mulai untuk membuat terobosan pembangunan infrastruktur, pembangunan

jalan desa, pembangunan kantro kepala desa, fasilitas pendidikan, fasilitas ekonomi, jembatan dll” (wawancara dengan Bapak Junaedi tanggal 18 Juli 2019).

BUMDes Tirta mandiri dalam perjalananya memiliki banyak kendala meskipun sudah menjadi keputusan bersama tetapi masih saja ada kelompok masyarakat yang mencemooh dan memandang dengan sebelah mata. Masyarakat semakin pesimis kalau BUMDes akan bisa berkembang apalagi membawa sebuah perubahan yang ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat desa Ponggok sendiri. Masalah keterbatasan SDM tambah membawa kesulitan untuk menemukan orang yang mau betul-betul berjuang dalam merintis dan mengelola BUMDes, selain BUMDes adalah lembaga yang masih angat baru sekali di desa Ponggok. Tetapi bukan berarti tidak ada yang mau dalam mendukung dan berjuang walaupun hanya seberapa saja ikut bergabung.

Kepala desa Ponggok yang dijabat langsung oleh Bapak Junaedi Mulyono merupakan sosok yang sangat visioner, beliau melihat masa depan dengan

prinsip *beiliving is seeing* (kalau kita melihat baru percaya) itu adalah yang menjadi kekuatan sangat luar biasa untuk tidak pernah dalam mencapai cita-cita, karena beliau menyadari bahwa untuk masyarakat tidaklah semudah mengembalikan telapak tangan. Kebanyakan masyarakat itu berfikiran ketika melihat hasilnya langsung baru masyarakat percaya, maka perlu bukti untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. pada pemerintahan orde pertama beliau sudah melakukan terobosan-terobosan program yang membawa perubahan mendasar kepada masyarakat, mulai dari pembuatan jalan kampung, pembangunan infrastruktur, fasilitas usaha kesehatan, jalan poros desa, jalan usaha tani, fasilitas usaha pendidikan, fasilitas usaha ekonomi dengan membangun kios kuliner bagi masyarakat serta membangun kantor kepala desa untuk jati diri desa Ponggok.

4. Logo BUMDes Tirta Mandiri

Logo adalah suatu identitas yang digunakan oleh perusahaan, lembaga, instansi, atau organisasi untuk menggambarkan karakter yang dimiliki organisasi tersebut. Logo biasanya juga

menggambarkan citra positif yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Logo juga dapat diartikan sebagai wajah organisasi yang ketika dilihat dapat memberikan makna, fungsi, ataupun manfaat yang ada di organisasi tersebut.



Sumber: data manifestasi BUMDes Tirta Mandiri 2014

Arti logo BUMDes Tirta Mandiri:

- a. Tulisan Tm sebagai moto nilai kemandirian, kemapanan, dan kemantapan. Kepanjangan dari

Tirta Mandiri yaitu Tirta berarti air yang merupakan kekhususan atau kekhasan dari Desa Ponggok. Sedangkan Mandiri berarti berdiri.

- b. Tiga air yang bergelombang yaitu bahwa BUMDes mempunyai 3 tujuan utama yang tertera pada Bab IV pasal 6 AD/ARTBUMDes Tirta Mandiri.
- c. Tiga air yang bergelombang yang tidak sama besarnya berarti komposisi yang kompak
- d. Titik biru merupakan asas dari manajemen BUMDes yaitu satu asas satu Pancasila
- e. Oval hijau berarti berwawasan lingkungan Desa Ponggok
- f. Visual warna:

Warna biru tua simbol dari sikap dan sifat yang teguh.

Warna biru muda mempunyai karakter yang cerah dan menggambarkan kegembiraan dan kebanggaan dalam melayani masyarakat desa Ponggok

Warna hijau simbolis dari ramah lingkungan.

Sifat dari BUMDes ini yaitu mengelola aset potensi, aset desa, dan mengembangkan perekonomian desa

yang menguntungkan. Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program proyek pemerintahan dan pemerintahan daerah. Sebagai usaha desa, pembentukan BUMDes Tirta Mandiri menurut Anggaran Dasar BUMDes Tirta Mandiri Bab 4 pasal 6 bertujuan untuk:

- a. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa.
- b. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi yang produktif (berwira usaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
- c. Mendorong berkembangnya usaha kecil untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbatas dari pengaruh-pengaruh renternir.

C. Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Desa

Terbentuknya BUMDes memberi dampak yang sangat besar terhadap desa Ponggok, karena BUMDes telah memberi kontribusi yang sangat besar pada warga Ponggok yakni dengan dibukanya lapangan pekerjaan untuk warga Ponggok. Anggota yang bergabung dalam BUMDes sendiri terdiri dari masyarakat desa Ponggok. Berikut wawancara dengan bapak Junaedi Mulyono pada tanggal 17 Juli 2019.

“Saya itu ingin membantu perekonomian warga desa ponggok mbak, dengan cara apa, dengan cara mmeberi fasilitas lapangan pekerja untuk meraka yang sama sekali belum bekerja. Dan menciptakan generasi-generasi untuk masa mendatang. Soalnya apa mbak, disini banyak yang menganggur dan hanya mengandalkan pendapatan dari suaminya saja. Itupun untuk kebutuhan satu bulan juga minim mbak. Lha wong rata-rata warga disini itu sebagai petani mbak.”

Begitu juga yang dipaparkan oleh ibu Ratmi dalam wawancaranya pada tanggal 24 Agustus 2019

“Alhamdulillah mbak saya sudah mulai bekerja sejak adaya tempat wisata ini, awalnya

mah saya hanya dirumah saja mbak. Tetapi saat dibangunnya tempat wisata umbul Ponggok saya ikut bergabung di dalamnya. Lumayan lah mbak untuk nambah-nambah penghasilan buat kebutuhan sehari-hari mbak.

Adanya wisata yang ada di desa Ponggok itu mampu mengajak pemuda atau komunitas desa Ponggok untuk memanfaatkan potensi alam yang dimiliki desa Ponggok sebagai sumber untuk mencari nafkah warga dan kemajuan desa Ponggok sendiri. BUMDes ini juga berdampak pada perekonomian warga desa Ponggok yang sangat membaik. Seperti yang disampaikan oleh bapak Teguh dalam wawancara pada tanggal 24 Agustus 2019:

“Setelah dibukanya tempat wisata di sini, alhamdulillah mbak banyak warga yang ikut bergabung, termasuk saya mbak. Dulu saya kerjanya serabutan mbak, jadi buruh petani kalau dipanggil untuk nggarap sawah mbak kadang ya mencari ikan untuk dijual mbak. itupun penghasilnya kan juga tidak seberapa mbak untuk menghidupi keluarga. Semenjak dibukanya lapangan pekerjaan di Ponggok sendiri saya langsung ikut bergabung mbak (wawancara dengan bapak Teguh pada tanggal 24 Agustus 2019).

Senada dengan Ibu Fatimah dalam wawancara pada tanggal 24 Agustus 2019

“Iya mbak, alhamdulillah perekonomian warga ponggok ini semakin membaik bisa mencukupi kehidupan sehari-hari mbak, bukan lagi seperti dulu yang sempat dikategorikan sebagai desa tertinggal karena banyakarganya yang miskin.

BUMDes Tirta Mandiri juga memberi kontribusi dalam sektor pariwisata, secara tidak langsung BUMDes Tirta Mandiri telah mengangkat potensi yang dimiliki oleh desa Ponggok dan memperkenalkannya dalam kancah Internasional bahkan pernah mendapatkan penghargaan sebagai pemenang kategori Desa Wisata Pemberdaya Masyarakat yang diberikan kementerian Desa PDIT dalam expo BUMDes Nusantara 2017 di Bukit Tinggi, Sumatra Barat. Dalam hal ini BUMDes tidak bekerja sendiri melainkan menggandeng juga aparatur pemerintah desa, karang taruna, PKK, pokdarwis (kelompok sadar wisata) desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.

Proses pemberdayaan dimaknai sebagai serangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara kronologis sistematis yang berupaya untuk mengubah masyarakat yang pada awalnya memiliki kemampuan yang kurang berdaya menjadi masyarakat

lebih berdaya. Proses akan merujuk pada sebuah tindakan yang nyata dan dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, yang meliputi pengetahuan, sikap, dan perilaku menuju pada penguasaan dan ketrampilan yang baik (Pratama, 2016:3).

Pada proses pemberdayaan masyarakat ini dibutuhkan waktu yang sangat lama mulai dari pemaparan masalah, menganalisis masalah, menentukan tujuan, merencanakan tindakan, melaksanakan tindakan dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan BUMDes Tirta Mandiri dalam memberdayakan masyarakat desa Ponggok. Sehingga dapat terwujud program-program pemberdayaan yang sangat efektif

Upaya yang dilakukan oleh BUMDes Tirta Mandiri untuk memberdayakan masyarakat desa Ponggok merupakan hal yang sangat tidak mudah. Ada beberapa tahapan untuk tercapainya sebuah pemberdayaan yang dilalui. Seperti memberikan penyadaran kepada masyarakat desa Ponggok tentang lingkungan dan potensi yang dimiliki desa,

menumbuhkan kemauan masyarakat untuk ikut serta bergabung dalam BUMDes.

1. Tahap pemaparan masalah (*problem prossing*)

Tahap pemaparan masalah dilakukan dengan musyawarah bersama kepada masyarakat desa Ponggok. Guna untuk membicarakan persoalan yang ada dan menggali potensi yang dimiliki desa dan bisa di manfaatkan bersama masyarakat Ponggok. Musyarawarah ini dilakukan di gedung serbaguna tepatnya di lantai 2 kantor kepala desa Ponggok yang terdiri dari ketua RT, ketua RW, BPD, pemerintahan desa, kelompok warga untuk membahas isu-isu strategi salah satunya adalah pendirian BUMDes. Mendirikan BUMDes pada dasarnya membangun tradisi berdemokrasi di desa untuk mencapai derajat ekonomi desa yang lebih tinggi. Dengan berbekal daftar potensi dan peta aset desa, forum musyawarah desa ponggok melakukan praktik dengan *deliberative democracy* untuk menyepakati gagasan pengelolaan dan pemanfaatan aset-set desa melalui BUMDes.

Sebagaimana wawancara dengan bapak Junaidi sebagai kepala desa Ponggok:

“Saya itu ingin sekali membuat desa Ponggok ini bisa maju mbak, dalam artian maju di segala hal yang kita bisa. Selama saya menjabat sebagai kepala desa rasanya tidak tenang kalau belum bisa membuat kemajuan di desa dan memberdayakan masyarakat sini. Saya berkeinginan besar untuk memajukan dan membangun desa agar keluar dari kemiskinan. Karena dulu desa ini termasuk desa yang miskin mbak padahal desa ini mempunyai kekayaan yang sangat melimpah berupa mata air, pertanian, perikanan. Ada beberapa aspek yang membuat saya itu berkeinginan untuk maju. Dulu saat saya berada di Riau mengalami kesulitan berupa wabah malaria kemudian saya mulai untuk melakukan hal yang dapat membantu masyarakat sana agar tidak lagi mendapatkan kesulitan untuk menuju darat maupun kesulitan dalam perekonomian. Naaah, selama saya disana memperoleh ilmu kemanusiaan sebagai petani udang mbak. Pada waktu itu wabah penyakit malaria yang menjangkit desanya membuat saya harus berfikir keras bagaimana saya harus membuat penduduk desa itu bisa selamat walaupun akses menuju darat membutuhkan waktu yang sangat panjang serta tidak setiap hari ada kapal yang beroperasi. Dari kepedulian saya itu, saya mencari cara untuk mengatasi permasalahan itu yaitu engan cara membuat parit untuk menangkap udangyang nantinya udang itu akan digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat desa sana. Setelah pengalaman

saya di Riau saat itulah, ketika saya kembali ke Jawa saya malah di calonkan sebagai kepala desa Ponggok (Wawancara dengan Bapak Junaidi Mulyono selaku Kepala desa Ponggok pada Tanggal 18 Juli 2019).”

Awal terbentuknya BUMDes tidak lain adalah dorongan dari masarakat desa Ponggok yang ingin berdaya dan maju dalam ketertinggalanya. Kami mengumpulkan sekumpulan masyarakat, ketua RT, ketua RW, perangkat desa guna membahas permasalahan yang sudah lama kita hadapi ini. Saya bertekad untuk membangun masyarakat agar bisa berdaya dan bisa mandiri dengan kita melihat potensi yang dimiliki oleh desa sendiri. Kita mempunyai banyak potensi alam tetapi kita tidak bisa memanfaatkan itu. Potensi itu berupa banyaknya air bahkan kita punya kolam besar yang biasa disebut dengan “Umbul”. Dulu umbul itu dipegang oleh orang asing dan dikelola oleh mereka. Akan tetapi itu tidak berimbas kepada masyarakat ponggok. Masyarakat ponggok tidak bisa menikmatinya. Bahkan masyarakat resah karena lingkungan disekitar umbul itu sangat kumuh dan tidak terawat. Akhirnya, kami bermusyawarah dengan

pemerintahan desa Ponggok untuk mengambil alih itu agar bisa berada di tangan BUMDes. Setelah dengan berbagai cara maka beralihlah umbul itu yang awalnya di tangan orang asing menjadi milik BUMDes.

“Ada ketertarikan yang membuat saya ingin merubah desa Ponggok menjadi desa yang maju mbak. Masak iya desanya akan seperti ini terus, kan tidak. Dulu saya belum tau persisis bagaimana desa ini akhirnya saya mengajukan surat permohonan kepada salah satu perguruan tinggi utuk mengirimkan mahasiswa guna menjalani tugas KKN (Kuliah Kerja Nyata) mandiri. Kemudian dari UGM mengirimkan beberapa mahasiswa untuk KKN di desa Ponggok. Mereka saya mintai untuk mendata warga sini yang berpendapatan rendah dan mencatat semua permasalahan yang dihadapi oleh warga desa Ponggok. Lha dari hasil data tersebutlah mbak saya tau bahwa warga Ponggok sangat banyak yang tersejerat hutang pada rentenir bahkan juga pernah dijuluki sebagai desa rentenir mbak. Berdasarkan itulah rencana pemerintahan desa dalam mendirikan BUMDes semakin mantap untuk membantu warga Ponggok (wawancara dengan Bapak Junaedi Mulyono pada tanggal 18 Juli 2019)”

Beliau juga menambahkan dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Sebelum kita akan membangun desa agar bisa maju kan kita harus tau betul bagaimana keadaan desa itu sendiri. Tidak mungkin to mbak kita mau membangun desa tapi kita tidak tau akarmasalah yang dihadapi masyarakat itu sendiri. Lhah dari kita mengetahui masalah tersebut kita kan baru bisa memaparkan sebuah masalah dan mengamabil langkah apa yang seharusnya kita ambil. Seperti itu mbak. Jadi semua itu bukan kok bim salabim akan menjadikan masyarakat bisa berdaya, dan membangun kemandirian masyarakat tanp kita tau semua yang ada dimasyarakat (wawancara dengan Bapak Junaedi Mulyono pada tanggal 18 Juli 2019)”

2. Analisis masalah

Dalam analisis masalah dilakukan setiap ada pertemuan yang merupakan sarana untuk musyawarah bagi pengurus BUMDes, sekelompok masyarakat, dan pemerintahan desa. Selain sebagai wadah untuk musyarawarah, tujuan diadakanya pertemuan adalah untuk ajang silaturahmi, rapat koordinasi serta evaluasi. Dan berawal dari musyawarah inilah muncul gagasan, ide-ide yang cemerlang dari masyarakat untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa Ponggok.

“Setiap bulan sekali kami pasti mengadakan musyawarah kepada masyarakat, jajaran pengurus dan pemerintahan desa untuk mendiskusikan masalah masalah yang dihadapi saat itu. Biar kami tahu bagaimana keluhan kesah mayarakat, dan apa yang dirasakan oleh masyarakat desa ponggok. Kalau tidak dari masyarakatnya sendiri yang berbicara kami tidak tahu apa yang mereka rsakan, maka dari itu kami selalu mengadakan musyawarah desa, seperti itu mbak. Setelah kita tau bagaimana keadaan di lapangan dari jajaran pemeritahan desa melakukan tindakan lebih lanjut untuk mewujudkan itu semua. (wawancara bapak Junaidi mulyono tanggal 18 Juli 2019)”.

3. Penentuan tujuan

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pemberdayaan adalah terwujudnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan, kelembagaan. Keberadaan BUMDes juga mendorong tumbuhnya kegiatan produktif masyarakat desa Ponggok. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka BUMDes Tirta Mandiri bersama pemerintahan desa berusaha untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pengelolaan BUMDe.berbagai ide-ide dan sasaran di sampaikan kepada anggota

dalam formm musyawarah rutinannya yang dilakukan tiap sebulan sekali.

“Saat saya dan jajaran kepengurusan mengadakan musyawarah setiap bulannya saya selalu mengulas bagaimana kelanjutan dari adanya BUMDes tersebut. Kita merancang tujuan kita itu untuk apa? program-program apa yang akan kita ambil dalam memberdayakan masyarakat dan kemajuan desa Ponggok sendiri” (wawancara dengan bapak Junaedi pada tanggal 18 Juli 2019)

Pada pertemuan itu, membahas mengenai berbagai potensi yang dimiliki oleh desa. Yang dalam musyawarah tersebut menghasilkan usulan-usulan dari anggota untuk merintis sebuah program-program baru dalam mengembangkan desa Ponggok bersama BUMDes. Produk unggulan antara lain:

- a) Menjadikan umbul sebagai tempat wisata
- b) Mengembangkan produk unggulan desa yaitu olahan makanan berbahan dasar Ikan Nila (sebagai oleh-oleh wisatawan)
- c) Optimalisasi Umbul Ponggok sebagai tempat Resepsi, cafe, dan live music

- d) Kawasan waduk galau sebagai ruang terbuka hijau wisata kuliner dan pemancingan
- e) Kawasan umbul besuki sebagai wahana wisata alam

Program unggulan diatas merupakan alternatif untuk memberdayakan masyarakat. Selain bisa memanfaatkan potensi desa yang ada, diharapkan mampu membantu perekonomian warga karena masih banyak warga yang berstatus ibu rumah tangga, yang hidupnya masih menggantungkan pendapatan suami.

4. Perencanaan tindakan

Untuk menindak lanjuti usulan-usulan program-program maka harus adanya tindak lanjut dari BUMDes guna untuk menyepakati program apa yang akan dilaksanakan. Setelah melalui beberapa pertimbangan maka disepakatilah program-program tersebut. Dalam rapat kordinasi juga disepakati program jangka pendek meliputi pelatihan pengolahan makanan berbahan dasar ikan, juga

program jangka panjang meliputi tempat wisata air, toko desa, tempat kuliner.

“Setelah kita udah tau arah dan tujuan kita untuk apa kita sudah menyepakati program-program itu apa saja lalu kita harus merencanakan apa yang harus kita lakukan untuk kedepan mbak. Bukan soal program itu bagus atau jelek tidak, tapi seberapa kuat kita melakukan itu dan mendobrak tujuan itu agar bisa mencapainya. Program itu juga mencakup program jangka pendek dan juga program jangka panjang” (wawancara dengan bapak Junaedi pada Tanggal 17 Juli 2019)

Hasil dari sebuah perencanaan itu di tuangkan kedalam musyawarah desa atau yang sering disebut sebagai rembuk desa. menyepakati tindak lanjut yang akan dilaksanakan menyusun sebuah rencana-rencana untuk jangka pendek dan jangka panjang merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dalam mencapai tujuan itu sendiri.

5. Pelaksanaan tindakan

Pelaksanaan merupakan langkah awal untuk menentukan keberhasilan dalam menyelenggarakan suatu program pemerdayaan. Oleh karena itu maka

perlu adanya susunan program pemberdayaan agar bisa mencapai tujuan.

a. Kerjasama

Sebelum terbentuknya BUMDes Tirta Mandiri masyarakat desa Ponggok banyak yang menjadi pengangguran di rumah, tidak mempunyai pekerjaan. Selagipun mempunyai pekerjaan mereka banyak yang bekerja di pabrik Aqua, petani.

“Dulunya masyarakat menyepelekan adanya BUMDes, namanya juga orang desa kalo belum lihat hasilnya pasti tidak akan percaya. Bahkan dulu sempat ada yang bilang “ngono ndak iso maju tenan BUMDes nya, paling ya cuma sebentar aja bertahan”. Tetapi kami masih tetap berjuang untuk membangun desa agar lebih maju dan berdaya, biarkan orang mau menganggap seperti apa. Yang penting kita melakukan untuk desa. Setelah itu kerjasama dengan masyarakat baru dilakukan setelah adanya BUMDes berdiri dan maju. Kami mengajak kepada masyarakat untuk bergabung dalam BUMDes. Bersama-sama memajukan desa dan memanfaatkan potensi lokal yang ada di desa. Tetapi alhamdulillah setelah mengetahui hasil yang baik, masyarakat dengan suka rela ikut bergabung dengan BUMDes tersebut

(wawancara dengan Pak Joko Winarno pada tanggal 23 februari 2019)

Senada dengan yang disampaikan dengan mas Dodi sebagai marketing Umbul Ponggok dalam wawancaranya tanggal 23 februari 2019 sebagai berikut:

“Warga banyak yang tidak percaya dengan adanya BUMDes ini mbak, bahkan saat saya mengajak kerjasama dengan mereka, mereka hanya memandang sebelah mata. Tapi dari itu semua saya langsung berfikir, apa harus ada tindakan terlebih dahulu dan menghasilkan sesuatu yang saya bangun setelah itu mereka baru percaya akan keberhasilan tersebut. Waktu demi waktu saya bersama jajaran pemerintah desa dan pengurus BUMDes

Selain menjalin kerjasama dengan masyarakat, BUMDes Tirta Mandiri juga menjalin kerjasama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam pengembangan kapasitas karyawan, sistem pelayanann, sistem manajemen. BNI46 pada awal kerjasama dengan BUMDes Tirta Mandiri, memberikan edukasi dan pengalaman kerja kepada manajemen, staff BUMDes Tirta

Mandiri dan masyarakat desa Ponggok. Dengan harapan BUMDes Tirta Mandiri itu bisa dikelola dengan baik dan bisa secara maksimal. Dan dengan tujuan untuk transparansi dan efektivitas kerja supaya menjadi etos kerja dalam pengembangan manajemen BUMDes Tirta Mandiri. Kerjasama ini diterima dalam pemeritahan desa Ponggok dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

“Kami menjalin kerjasama di PT BNI46 juga selain mengajak masyarakat, tujuan adalah untuk meng back up dana dari desa, juga untuk mengembangkan kinerja masyarakat terutama yang bergabung dalam Bumdes seperti karyawan bumdes tirta mandiri” (wawancaradegan Bapak Joko Winarno pada tanggal 17 Juli 2019).

Berdasarkan hasil dari wawancara itu menyatakan bahwa BUMDes juga menjalin kerjasama dengan PT BNI46 guna meng back up dana dari desa. untuk pengembangan pelayanan, simpan pinjam, kapasitas karyawan.

b. Pelatihan pengelolaan tempat wisata dan Ikan Nila

Salah satu usahayang di dirikan oleh BUMdes tirta mandiri adalah pariwisata. Dalam pariwisata ini BUMDes mempunyai beberapa tempat wisata yang memimikat para pengunjung, diantaranya adalah umbul ponggok, umbul ciblon,umbul sigedang, dll. Tenaga kerja di tempat wisata itupun tidak lain adalah warga desa ponggok khususnya para pemuda desa Ponggok sendiri.

“Rata-rata yang bekerja di sini kan warga ponggok mbak, lha ke kreatifan warga sini juga masih kurang. Dilihat dari mereka yang jenjang pendidikannya hanyas samapai SMA. Akhirnya kami sepakat untuk melatih meraka dalam pengoprasian tempat wisata. Seperti dalam peyewaan alat-alat untuk saat menyelam, pengorasin dalam permodalan, juga dalam toko desa (wawancara dengan Bapak Joko tanggal 17 Juli 2019)”.

Hal tersebut juga di perkuat oleh mas dodi sebagai marketing di Umbul ponggok pada tanggal 23 Februari 2019

“Iya mbak, saya disisni juga dulu tidak ada bisa apa-apa, tetapi dari pihak

BUMDes sendiri telah memfasilitasi semua yang bergabung dalam bumdes untuk dilatih bagaimana kinerja mereka, bagaimana untuk menjalankan operasional pada bidang penyewaan alat-alat snorking, pemasaran tempat wisata, permodalan, investasi dll. Dari situ kita baru mengerti mbak

Melihat dari itu bahwa bumdes mengajak masyarakatnya agar bisa mengikuti dalam setiap proses yang dilakukan oleh bumdes. Yang setidaknya itu adalah bisa bermanfaat buat warga desa ponggok khususnya terhadap pemuda desa ponggok. Karena yang akan menjadi penerus dari bumdes adalah para pemuda tersebut.

Selain dalam hal wisata BUMDes juga bermitra dengan PKK. PKK yang diketua oleh Ibu lurah sendiri membuat inisiatif untuk pembuatan pengelolaan dari ikan nila yang hasilnya nanti akan dijual kepada para pengunjung yang menikmati wisata di desa Ponggok. Melihat desa juga mempunyai potensi alam selain air, ponggok juga mempunyai lahan seluas 800 H yang digunakan untuk budidaya ikan Nila. Dari situ PKK membuat kelompok untuk membuat ikan

nila itu agar bisa dijualnya bukan berupa ikan yang masih segar, akan tetapi ibu-ibu PKK itu mengolahnya menjadi abon ikan nila, naget, ikan asin, dll yang kemudia nanti akan dijual sebagai oleh-oleh khas Ponggok

“iya mbak, kita menjual ikan itu bukan berupa ikan segar yang dari kolamnya langsung, akan tetapi kita menjualnya sudah berupa nugget, abon ikan nila, stek duri ikan nila dan masih banyak lagi mbak. Kita menggeret ibu-ibu untuk melatih melatih mereka dalam pembutan ikan nila tersebut. Kemudian kita menjualnya bersamaan dengan penjualan tiket masuk wisata, jadi dari situ parawisata ketika masuk di tempat wisata secara langsung membeli produk ikan nila tersebut, otomatis kan mbak bisa membantu perekonomian warga sini juga (wawancara dengan Ibu rohmah pada tanggal 23 agustus 2019)”.

Begitu juga yang di sampaikan oleh bapak Joko Winarno pada tanggal 23 Agustus 2019 sebagai berikut:

“Betul mbak dari Bumdes sendiri menjadi mitra bagi ibu PKK dalam penjualan olahan dari ikan Nila, itu sudah menjadi bagian dari oleh-oleh yang akan dibawa pulang wisatan saat berkunjung ke desa Ponggok. Selain mereka menikmati wisata

di desa Ponggok mereka juga bisa menikmati produk dari desa.

BUMDes tirta mandiri sudah bekerja sama dengan PKK dalam hal pemasaran ikan nila. Ikan nila tersebut di jual dengan paket tiket masuk wisata. Dengan begitu para pengunjung ketika masuk dan membeli produk itu maka mereka sudah membantu perekonomian warga desa pongok. Anggota PKK itu yang belum bisa mengolah ikan nila di ajari secara rutin sampai mereka bisa mengolah ikan nila. Seiring berjalanya waktu ide-ide itu muncul dari anggota untuk mengembangkan olahan ikan nila tersebut.

c. Investasi

Setelah berdirinya BUMDes Tirta Mandiri banyak dari perusahaan luar yang ingin menjadi investor utama di BUMDes Tirta Mandiri untuk pembangunan pariwisata di desa Ponggok, akan tetapi dari pihak bumdes sendiri memberikan kesempatan itu kepada warga desa ponggok sendiri untuk berinvestasi di BUMDes dan menanamkan modal BUMDes tersebut.

“Bumdes hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat desa Ponggok untuk menanamkan modal dan mau berinvestasi. Pemerintahan desa Ponggok tidak memberikan kesempatan buat investor luar untuk menanamkan modal di desa ponggok. Karena saya ingin masyarakat desa sendiri yang berinvestasi di desa ini bukan dari luar. Pengalaman dahulu banyumili yang sekarang menjadi ponggok ciblon diambil oleh investor luar, akhirnya menjadi tidak terawat dan bangkrut. Maka setelah itu langsung diambil alih oleh desa untuk mengembangkannya kembali dan meningkatkan kualitas banyumili atau yang sekarang disebut ponggok ciblon itu. dan desa juga memanfaatkan data demografi desa untuk menjadikan modal perkembangan desa (wawancara dengan bapak Joko Winarno pada tanggal 17 Juli 2019)

Pemerintahan desa Ponggok tidak lagi memberikan peluang bagi investor luar untuk berinvestasi. Mengingat kejadian tentang banyumili yang sekarang menjadi umbul ciblon yang dipegang oleh investor luar itu sangat merugikan masyarakat, tidak memberi kenikmatan bagi masyarakat dan hanya memberikan keuntungan di pihak perusahaanya saja. Oleh

karena itu, saat kontrak kerjasamanya sudah habis mulailah pemerintahan desa mengambil alih saham-saham itu dan di kelola oleh desa sendiri. Pemerintahan desa ponggok bekerjasama dengan BUMDes Tirta Mandiri untuk fokus dalam membangun kembali wisata Umbul Ciblon yang dulunya sudah tidak terawat lagi yang kedepanya akan dibuat untuk obyek rekreasi dan wisata edukasi bagi masyarakat.

Masyarakat desa Ponggok bisa berinvestasi di BUMDes Tirta Mandiri dengan cara menjual saham-saham kepada masyarakat desa pongok. Adapun saham-saham itu berupa saham kecil, saham sedang, dan saham besar. Saham kecil itu masyarakat bisa membeli saham untuk investasi di BUMDes Tirta Mandiri seharga Rp. 100.000, Adapun untuk saham yang sedang masyarakat desa Ponggok bisa membelinya dengan harga Rp. 1000.000 sedangkan untuk saham besar masyarakat bisa membelinya dengan harga Rp. 5000.000.

Selain masyarakat desa Ponggok yang bisa investasi di BUMDes, lembaga-lembaga yang ada

di desa Ponggok seperti RW, PKK, PAUD/TK juga bisa berinvestasi di BUMDes tersebut.

“selain kami memberikan kesempatan kepada masyarakat desa ponggok kami juga memberikan kesempatan kepada lembaga-lembaga yang ada di desa seperti sekolah PAUD/TK, PKK, RT/RW dll untuk ikut berinvestasi di BUMDes Tirta Mandiri. Kalau masyarakat bisa membeli saham kecil, sedang dan besar, akan tetapi untuk lembaga bisa membeli saham untuk inestasi di BUMDes itu senilai Rp 50 juta untuk lembaga RT/RW sedangkan untuk yang PKK itu bisa berinvestasi senilai Rp. 100 juta mbak, lalu untuk TK/PAUD bisa beinvestasi senilai Rp. 25 Juta” (wawancara dengan bapak Joko Winarno pada tanggal 17 Juli 2019).

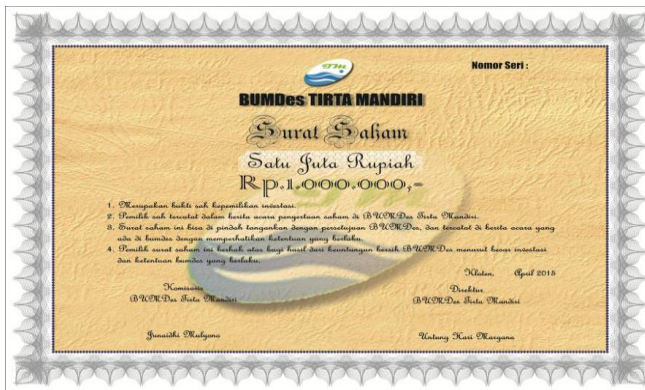
Hal itu juga disampaikan Ibu Rohmah dalam wawancaranya pada tanggal 23 Agustus 2019

“saya juga ikut investasi dengan membeli saham di BUMDes Tirta Mandiri mbak, bisa buat tambah-tambah penghasilan juga. Saya membeli saham sedang mbak yang bernilai Rp. 1000.000. dari hasil itu perbulan kita mendapatkan uang kebutuhan tambahan malah bisa saya tabung mbak untukkeperluan kedepan saat mendesak” .

Gambar 2.1
Sertifika saham sebesar Rp. 100.000



Gambar 2.3
Sertifikat saham sebesar Rp. 500.000



Gamabar 2.4
Sertifikat saham sebesar Rp. 5000.000



Sumber: file RPJMDes desa Pongkok 2016

6. Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap akhir dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDes Tirta mandiri. Evaluasi ini dilakukan guna melakukan pembenahan-pembenahan kekurangan. Evaluasi juga menitikberatkan pada keberhasilan BUMDes dalam memperdayakan masyarakat desa Pongkok.

“Saya selalu mengadakan evaluasi kepada masyarakat mbak, entah itu secara formal maupun secara tidak formal. Tapi saya seringnya menemui langsung di setiap event-event yang diadakan atau menemui langsung pada masyarakat untuk

menanyakan tentang kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan. Masihkah ada kekurangan yang harus diperbarui lagi, atau bahkan malah kegiatan itu tidak layak untuk dijalankan” (wawancara dengan bapak Junaedi tanggal 18 Juli 2019)

Senada dengan yang disampaikan oleh bapak oko winarno pada Tanggal 28 Agustus 2019 sebagai berikut:

“evaluasi itu sering lakukan oleh bapak Junaedi mbak, beliau sering ke masyarakat untuk menanyakan kegiatan-kegiatan mereka. Beliau malah jarang berada dikantor mbak, paling kalau di kantor Cuma pas waktu ada kunjungan ari mana yang maengaharuskan beliau mendampingii kunjungan tersebut. Selebihnya beliau mengajak ngobrol warga Ponggok dari kalangan manapun. Tidak ada sekat diantara beoliau dengan warga Ponggok sendiri. Warga Ponggok juga senang akan hal itu, jadi mereka mengutarakan semua tanpa harus menunggu ketika ada kumpulan atau meusyarawah yang diadakan oleh RT/RW setempat”

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pemberdayaan adalah terwujudnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan, kelembagaan. Berdasarkan dari musyawarah desa, evaluasi dilakukan setiap bulan sekali atau sewaktu-waktu jika dianggap sangat perlu

sesuai dengan ketentuan AD-ART Bumdes, dimana hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris pada bulan berikutnya. Prinsip pengelolaan Bumdes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooptif, partisipasi, emansipasi, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan selfhelp yang dijalankan secara profesional dan mandiri. Dalam pengelolaan unit-unit usaha di Bumdes tirta mandiri, telah memenuhi prinsip-prinsip dimana pengelolaan unit usaha selalu berkembang ke depannya dan membentuk unit-unit baru dalam rencana jangka panjang untuk kedepan.

D. Hasil Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Desa

Hasil yang terjadi pada masyarakat merupakan akhir dari sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Yang merupakan hasil dari sebuah proses pelaksanaan panjang. Dan merupakan sebuah hasil akhir dari proses pelaksanaan pemberdayaan dimana masyarakat sangat berantusias terhadap

pemberdayaan terhadap BUMDes Tirta Mandiri desa Pongok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.

Adanya pemberdayaan yang terselenggara diharapkan bisa memberikan hasil yang positif dan kesejahteraan bagi masyarakat desa Pongok. Hasil dari penyelenggaraan lebih berfokus pada kemandirian masyarakat dan masyarakat mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mereka bisa mandiri. Desa pongok merupakan desa yang sudah mempunyai BUMDes yang sangat maju dan mempunyai banyak usaha untuk memberdayakan masyarakat desa pongok serta mendapatkan pendapatan desa yang sangat tinggi. Sehingga mampu untuk memberdayakan masyarakat desa pongok.

Hasil dari sebuah pemberdayaan itu tidak hanya dilihat dari satu segi saja melainkan bisa dilihat dari segi sosial, budaya, agama, dan ekonomi masyarakat desa Pongok.

1. Hasil Ekonomi

Sebelum adanya pemberdayaan oleh BUMDes di desa Pongok pendapatan masyarakat desa Pongok masih dibawah garis kemiskinan. Pekerjaan mereka pun rata-rata sebagai petani yang

pendapatanyatidak menentu, bahkan juga banyak yang tidak bekerja (pengangguran). Untuk keperluan rumah tangga sehari-hari seperti pangan, sandang, listrik, biaya sekolah anak dan kebutuhan lainnya mereka harus mengambil hutang kepada rentainer yang masukdi desa Ponggok saat itu.

Seiring dengan pendirian BUMDes itu warga sudah tidak lagi mengambil hutang dari rentainer. Para pemuda bisa bergabung bekerja di BUMDes yang telah menyediakan usaha-usaha untuk masyarakat selain itu orang tua juga bisa berjualan di tempat yang telah disediakan yaitu di area wisata umbul Ponggok, Umbul ciblon atau di area kuliner yang berada disebelah dengan kantor Kepala desa Ponggok. Pada segi ekonomi ini program pemberdayaan masyarakat yaitu guna menambah pendapatan masyarakat karena pemberdayaan tersebut mampu memberikan usaha baru bagi masyarakat desa Ponggok. Pendapatan merupakan sejumlah uang yang diterima dari hasil kerja keras yang pendapatan tersebut mampu untuk memebuhi kebutuhan rumah tangga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kebutuhan keluarga tersebut

meliputi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal. Yang apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka kesejahteraan keluarga tidak akan terwujud.

“Alhamdulillah mbak, dulu saya pengangguran tidak bekerja, tapi saat ada wisata Umbul Pongok ini saya dapat berjualan disini. Yaa untuk menghidupi keluarga cukup lah insyaAllah mbak. Yang penting bisa mendapatkan pekerjaan. Sebagian warga sini juga seperti itu mbak, sejak pemerintah desa memberdayakan masyarakatnya yang dulunya tidak mempunyai pekerjaan dikasih pekerjaan. Desanya sekarang juga rame mbak, banyak pengunjung dari luar kota bahkan juga dari luar jawa juga datang kesini entah itu rombongan mau berwisata atau rombongan yang mau Study Tour di BUMDes Tirta Mandiri (wawancara dengan Ibu Rohmah tanggal 17 Juli 2019)

Begitu pula yang dikatakan oleh Ibu Nur tanggal 27 Maret 2019

“Iya mbak Alhamdulillah, itung-itung bisa membantu pendapatan suamilah, dari pada di rumah Cuma nganggur tidak ngapa-ngapain mending saya jualan makanan untuk parawisatawan. Hasilnya ya lumayan lah mbak untuk membiayai sekolah anak, membeli kebutuhan rumah tangga.

Disamping itu saya juga mendapatkan pengalaman mbak”.

lain pula dengan yang dipaparkan oleh Mas Dodit tanggal 27 maret 2019

“saya kerja di BUMDes ini juga baru mbak, saya habis kuliah langsung di panggil untuk ikut bergabung disini, ya lumayanlah mbak, buat menambah pengalaman. Yang kerja di sini kan tidak ibu-ibu atau orang tua saja tetapi yang mau bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan. Jadi kan mereka mempunyai pendapatan sendiri”.

Dengan kata lain, bahwa masyarakat desa Pongkok setelah adanya pemberdayaan menjadi lebih baik mereka bisa menghasilkan pendapatan yang lebih dari pemberdayaan yang telah dirintis oleh BUMDes.

2. Segi Sosial

Segi sosial dari pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas adalah terbangunya kesejahteraan masyarakat dalam pengetahuan, kegigihan, dan keterampilan masyarakat. pemerintah desa pongkok menyadari bahwa keikutsertaan masyarakat desa pongkok dalam membantu memberdayakan

masyarakat adalah bersifat penting. Yang mana hal tersebut akan menjadi keberhasilan BUMDes dalam memberdayakan warga desa Ponggok. Sekarang tercatat kurang lebih dari 200 kepala keluarga (KK) yang ikut bergabung dalam kegiatan BUMDes.

Program-program dari BUMDes itu sendiri adalah satu rumah, satu mahasiswa. Jadi tiap warga yang kuliah, diberikan bantuan Rp 300.000 per bulan yang di tranfer langsung. Dengan adanya progam ini diharapkan akan ada banyak sarjana di desanya. Ada juga progam jaminan kesehatan desa, dimana progam ini menaungi warga tanpa terkecuali, mereka mendapatkan jaminan perawatan kesehatan untuk kelas 3. Untuk warga jompo, desa menyediakan dana jaminan sosial berupa uang lauk pauk senilai R 30.000 per bulan yang di rapel beberapa bulan sekali.

“Alhamdulillah mbak kesadaran warga semakin tinggi, dulu sempat mereka tidak percaya akan keberhasilan dari BUMDes sendiri, saya dulu juga memandang negatif. Ketika mau memeberdayakan masyarakat, maka harus ada kesadaran dari warga sendiri untuk merubah yang dulu tak berdaya sehingga mereka mampu untuk keluar dari ketidakberdayaan yaitu merubah untuk menjadi masyarakat yang mandiri. Terlebih

dari masyarakat yang mempunyai keinginan tinggi untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keegoisan menikmati sendiri program untuk kepentingan bersama. (wawancara dengan bapak Junaidi sebagai kepala desa Pnggok tanggal 17 Juli 2019)

Hal itu juga dikatakan oleh Ibu sari sebagai berikut

“Alhamdulillah mbak masyarakat Ponggok banyak yang bergabung di kegiatan BUMDes, mereka sangat berantusias dan juga welcome. Ketika BUMDes mengadakan kegiatan. Ketika ada gotong royong masyarakat juga langsung bilang “ayo” tanpa ada alasan lain untuk tidak ikut serta dalam gotong royong. Dan ketika ada yang terkena musibah kita bareng-bareng untuk membantu dan guyub rukun mbak (wawancara dengan bu sari pada tanggal 3 april 2019)

Seperti yang diungkapkan dengan Ibu Rohmah sebagai berikut:

“Setiap Bulan saya selalu mengikuti pelatihan-pelatihan. Dari BUMDes sendiri kan ada pelatihan pembuatan makanan dari bahan Ikan Nila mbak. Entah itu nanti di buat naget, dibuat abon, atau yang lain. Warga banyak yang bergabung dalam pelatihan itu. Dari pada saya hanya berdiam diri di rumah tetapi saya tidak tau apa-apa maka saya mulai ikut pelatihan-pelatihan itu, jadi lebih ada

manfaatnya sih mbak (wawancara dengan Ibu Rohmah tanggal 17 Juli 2019)

Kemauan masyarakat yang tinggi ini haruslah ditarik lebih dalam agar mau dan bersedia dalam mengambil andil kegiatan program-program pemberdayaan yang nantinya juga akan diwujudkan ke dalam BUMDes. Sehingga kegiatan pemberdayaan itu nanti ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara signifikan.

3. Lingkungan

Lingkungan merupakan hal yang sangat identik dengan sebuah desa atas tempat tinggal seseorang. Jika suatu lingkungan desa itu bersih maka warga yang menempati juga akan terjaga kesehatannya. Akan tetapi beda lagi kalau dadri warganya sendiri yang tidak bisa hidup bersih jagankan ingin sehat, pasti penyakit juga akan menyerang mereka. Selain itu juga membuat desa akan terlihat kumuh dan kotor tidak terawat

Berdasarkan rembug warga atau musyawarah warga, warga mulai mengikuti program bersih desa. yang tujuannya adalah untuk membangun desa agar

tidak kumuh dan banyak sampah yang tersebar dimana-mana. Warga mulai sadar untuk membersihkan desanya agar terlihat indah juga agar tidak menjadi kumuh karena banyaknya para wisatawan yang berkunjung ke desa Ponggok

Seperti yang disampaikan oleh ibu Ratmi bahwasanya:

“lingkungan sekarang sudah bersih mbak, dibanding dengan lingkungan ponggok sebelum adanya tempat wisata di sini, lingkungan sini kumuh sekali. Tapi Alhamdulillah setelah adanya wisata yang di dirikan BUMDes sudah mulai bersih karena banyaknya pengunjung yang mau berwisata di ponggok” (wawancara dengan Ibu Maimunah pada tanggal 24 Agustus 2019).

Senada dengan yang disampaikan oleh ibu Ayu bahwasanya:

“Alhamdulillah lumayan sudah bersih mbk di badingkan dengan sebelum diberdayakan. Karena setelah ponggok menjadi tempat wisata dan banyak dikunjungi oleh parawisatawan, masyarakat sadar dan membuat lingkungan sebersih mungkin dan nyaman mungkin untuk para pengunjung yang datang ke ponggok. Agar mereka bisa merasakan keindahan di desa ponggok”(wawancara dengan Ibu Ayu pada tanggal 24 Agustus 2019).

Dijelaskan bahwa lingkungan desa Ponggok setelah adanya tempat wisata yang didirikan BUMDes banyak perubahan. Desa tersebut menjadi desa yang bersih. Dan warga desa ponggok bisa menikmati keindahan-keindahan yang dimiliki desa Ponggok itu sendiri. Selain itu warga desa Pongggok bisa menghirup kesehatan dengan lingkungan yang dimilikinya.

“Kalau lingkungan ya bersih iya mbak, akan tetapi kita mempunyai kekurangan dalam hal tempat parkir buat wisatawan yang ingin berkunjung di Ponggok, lahan yang di buat parkir oleh wisatawan hanya berada di badan jalan area wisata, jadi kelihatan masih semprawut mbak. Kalau bus pariwisatanya kan parkirnya di halaman kantor kepala desa mbak, tetapi terkadang tidak muat mbak, makanya parkirnya di badan jalan Ponggokdan itu akan semakin membuat macet” (wawancara dengan Ibu sari tanggal 3 April 2019).

Kurangnya lahan parkir yang ada di desa Ponggok membuat kelihatan semprawut, apalagi saat pada *weekend* para pengunjung akan semakin ramai dan membuat kemacetan itu semakin bertambah.

4. Agama

BUMDes Tirta mandiri juga bermitra dengan lazizawa yaitu yang bergerak pada bidang penerimaan zakat, lazizawa disini itu untuk amil zakat. Jadi warga Ponggok bisa mengumpulkan zakatnya di lazizawa, nanti dari lazizawa memberikan santunan tersebut kepada warga yang tidak mampu atau fakir miskin.

“Warga sini sudah pada mampu untuk memberikan zakat sendiri mbak, mereka menyisihkan hasil usahanya guna untuk mengeluarkan zakat. Dulu mereka yang menerima zakat, tapi untuk sekarang mereka sudah yang memberi zakat” (wawancara dengan bapak Mahmud sebagai ketua Lazizawa pada tanggal 23 Agustus 2019).

Selain itu dari lazizawa sendiri setiap sebulan sekali selalu mengadakan pengajian rutin atau yang sering disebut dengan selapan di desa ponggok, tepatnya di masjid. Yang menghadiri pengajian rutin tersebut kebanyakan dari warga desa Ponggok sendiri untuk mengkaji keagamaan dan menguasai tentang ilmu agama. Seperti yang disampaikan pula oleh bapak Joko pada tanggal 23 Agustus 2019

“Alhamdulillah mbak, warga sini banyak yang menghadiri pengajian selapanan yang selalu diadakan sebulan sekali, ya untuk menambah wawasan mereka dalam segi agama. Juga kami yang setiap berpenghasilan setiap gaji di potong 2,5% untuk kami berikan kepada yang berhak, dan kami undi 1 orang/tahun untuk kami berangkatkan umroh gratis”

Jadi, lazizawa tidak hanya mengurus perihal perzakatan saja dalam hal keagamaan seperti pengajian rutin juga dilakukan di desa Ponggok. BUMDes dalam ini juga membantu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lazizawa dalam segi moril atau dalam segi materil. Karena semua itu menyangkut dengan kebaikan warga desa Ponggok semua. Maka dari itu BUMDes Tirta Mandiri tak lepas dalam menuntun kegiatan-kegiatan tersebut.

BAB IV

ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS DESA

Pada BUMDes Tirta mandiri desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten

A. Analisis Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Desa Terhadap BUMDes Tirta Mandiri desa Ponggok Kecamatan Polanharjo kabupaten Klaten

Berdasarkan dari hasil penelitian baik dari data hasil dari pengamatan secara langsung saat observasi, wawancara oleh peneliti bahkan dari hasil dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti. Maka peneliti melakukan pembahasan mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas desa terhadap BUMDes Tirta Mandiri desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Pembahasan ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya. Berdasarkan kebijakan UU No 6/2014 tentang desa

mengamanatkan kepada pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, untuk mendorong perkembangan BUMDes dengan memprioritaskan BUMDes sebagai pengelolaan sumber alam di desa. BUMDes ini dibentuk pemerintah guna memanfaatkan segala potensi ekonomi, potensi daya sumber alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes didirikan melalui musyawarah desa, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Pokok bahasan yang dibahas dalam musyawarah tersebut adalah tentang pendirian BUMDes yang sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial budaya masyarakat sendiri, organisasi pengelola BUMDes, modal usaha BUMDes, dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes. Yang hasil kesepakatan itu akan menjadi pedoman untuk pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Peraturan Desa tentang pendirian BUMDes.

Hampir semua sebagian masyarakat desa Ponggok mempunyai pendapatan dibawah rata-rata. Kebanyakan juga masyarakat disana banyak yang hanya seorang petani saja bahkan juga banyak yang pengangguran tidak mempunyai pekerjaan. Dan juga banyak masyarakat yang telilit hutang

kepada rentenir. Padahal mereka harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan desa ponggok pernah menjadi salah satu desa tertinggal dan masuk dalam Inpres Desa Tertinggal (IDT). Melihat kasus tersebut muncul lah gagasan dari kepala desa Bapak Junaedi Mulyono untuk mendirikan BUMDes sesuai dengan peraturan dalam UU No.32 tahun 2004 yang di jelaskan secara implisit pada pasal 23 ayat 1. Disebutkan bahwa “desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” disebutkan juga bahwa tujuan utama berdirinya badan usaha milik desa dan untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Edi Suharto dalam bukunya “*Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat*” bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan. Kebebasan ini bukan hanya bebas mengemukakan pendapat saja melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. Selain itu juga untuk meningkatkan pendapatan dan dapat memperoleh barang-barang dan jasa yang diinginkan juga berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Begitu juga yang dipaparkan oleh Zubaedi (2013: 24) bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan

harkat dan martabat golongan masyarakat yang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan itu sendiri adalah terjadinya proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik dan mandiri. Proses perubahan tersebut direncanakan sedemikian rupa melalui berbagai tahapan yang sistematis, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Soleh, 202: 94).

Pemberdayaan masyarakat maksudnya adalah memperkuat masyarakat, dengan cara menggerakkan dan mendorong mereka agar dapat menggali potensi dirinya, dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya dengan cara melalui pembelajaran yang terus-menerus selama adanya pendamping atau fasilitator.

Dalam penelitian ini BUMDes Tirta Mandiri merupakan sebuah wadah pemberdayaan masyarakat desa Ponggok untuk meningkatkan pemanfaatan potensi yang ada di desa juga mensejahterakan perekonomian masyarakat desa Ponggok. Berkat adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh

BUMDes tersebut warga desa Ponggok mampu untuk mambantu keadaan masyarakat menuju lebih baik lagi. Dalam hal ini BUMDes sudah berhasil melakukan pemberdayaan sesuai dengan tujuan pemberdayaan pada BAB II yaitu merubah kehidupan yang lebih baik lagi dan lebih mandiri lagi yang proses pemberdayaan tersebut sudah direncanakan sedemikian rupa agar mencapai tujuan.

Melihat data-data dalam BAB III, dalam proses pelaksanaan pemberdayaan BUMDes Tirta Mandiri di tempuh melalui enam tahapan. Hal ini sesuai dengan tahapan pemberdayaan msyarakat sebagaimana dalam teori BAB II. Keenam tahapan itu sudah dilakukan oleh BUMDes Tirta Mandiri dalam upaya untuk memberdayakan warga desa Ponggok yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pemaparan masalah (*problem posing*)

Tahapan pemaparan masalah ini dilakukan untuk mengelompokan dan menentukan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa Ponggok. Dari pengertian ini masyarakat ponggok melakukan musyawarah bersama dengan anggota-anggota RT/RW untuk membahas dan memaparkan tentang permasalahan-permasalahan yang dialami masyartakat Ponggok. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh warga Ponggok sehingga mereka memaparkan semua permasalahan itu semua saat musyawarah desa berlangsung. Dari banyaknya

permasalahan yang dihadapi oleh warga Pongkok itu ditampung terlebih dahulu sehingga kedepan bisa tau apa yang harus dilakukan agar warga Pongkok bisa keluar dari masalah-masalah yang ada.

2. Tahap analisis masalah (*problem analysis*)

Tahap analisis ini untuk mengumpulkan informasi-informasi dari berbagai ruang lingkup permasalahan yang ada. Lingkup dari permasalahan ini adalah mulai dari permasalahan yang sangat rumit hingga permasalahan yang mudah untuk dibahas. Tahap analisis masalah pemberdayaan masyarakat Pongkok ini dilakukan pada saat musyawarah rapat di tingkat RT/RW untuk melakukan identifikasi. Permasalahan yang paling utama yang dihadapi saat itu adalah banyaknya masyarakat Pongkok yang terlilit hutang kepada rentenir dan juga banyak warga Pongkok yang miskin tidak mempunyai pekerjaan. Mereka hanya menggantungkan kehidupannya dari pendapatan suami. Selain itu juga menggali semua potensi alam apa saja yang ada di desa Pongkok untuk bisa menguntungkan masyarakat dan bisa dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat agar keluar dari ketidak berdayaan tersebut.

3. Tahap penentuan tujuan dan sasaran

Tahap ini merupakan tahap menentukan tujuan dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Untuk semua kegiatan dan program-program pemberdayaan di

tentukan oleh BUMDes yang telah disepakati oleh para anggota yang bergabung dengan BUMDes sesuai dengan tujuan BUMDes itu sendiri. Tujuan BUMDes sendiri adalah untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berlandaskan menurut adat istiadat/budaya, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program proyek pemerintah dan pemerintah daerah.

4. Tahap perencanaan tindakan

Tahapan ini merupakan tahapan untuk mencapai tujuan dengan beberapa langkah. Dalam merencanakan langkah yang akan ditempuh harus memperhatikan dari beberapa sisi bukan hanya dari satu sisi saja. Yaitu mulai dari dana, peralatan, jaringan sosial, tugas-tugas, dan pihak-pihak yang berpengaruh.

Bila dari BUMDes Tirta Mandiri dalam melakukan kegiatan-kegiatan dilakukan dan disiapkan dalam musyawarah desa. Disitu proses kegiatan yang telah direncanakan akan berjalan sesuai dengan tujuan. Akan tetapi, jika tidak ada perencanaan terlebih dahulu dalam musyawarah maka akan sulit dalam mencapai tujuan.

5. Tahap pelaksanaan kegiatan

Tahap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan langkah-langkah dalam

memberdayakan masyarakat yang telah dirancang dari awal. Dalam tahap ini harus memperhitungkan apa saja yang harus dilakukan untuk memberdayakan masyarakat untuk kurung waktu jangka panjang, selain itu juga, harus berfikir yang jenius guna untuk bisa memanfaatkan potensi yang ada didesa juga untuk dimanfaatkan bersama oleh masyarakat desa Ponggok sendiri.

Tahap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh BUMDes Tirta Mandiri dengan cara mengajak kerjasama dengan masyarakat Ponggok, kelompok masyarakat,perangkat desa, pengurus BUMDes

6. Tahap evaluasi

Tahap evaluasi ini adalah tahap yang dilakukan secara terus menerus. Baik secara formal maupun semi formal pada akhir sebuah proses dalam pemberdayaan masyarakat maupun secara informal dalam setiap bulan, minggu, atau harian untuk mengetahui sebuah perkembangan dan memperbaiki suatu kegiatan dalam proses pemberdayaan masyarakat yang akan datang.

BUMDes Tirta Mandiri melakukan evaluasi secara formal itu pada waktu bulanan.Sedangkan evaluasi secara semi formal itu dilakukan setelah ada acara atau event-event yang dilaksanakan hari itu.Dan bertanya kepada anggota-anggota tentang kegiatan pada hari ini.

B. Analisis Hasil Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Desa Terhadap BUMDes Tirta Mandiri desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah di tulis penulis sebelumnya bahwa keadaan warga Ponggok sangat tidaklah berdaya, bahkan sempat dikategorikan sebagai desa tertinggal oleh IDT (Inpres Desa Tertinggal).Masyarakatnya juga banyak yang pengangguran, tidak mempunyai pekerjaan hanya mengandalkan pendapatan dari suaminya saja.Selain itu masyarakat juga banyak mempunyai hutang kepada rentenir.Maka setelah kejadian itu, munculah ide-ide dari kepala desa Ponggok untuk membangkitkan masyarakat desa Ponggok agar tidak terjat hutang lagi kepada rentenir.

Setelah munculnya peraturan undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa, yang dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang desa miliki dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian desa. Sesuai dengan di terbitkannya undang-undang tersebut maka pemerintahan kabupaten Klaten kemudian menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 20 tahun 2006 mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menimbang dari peraturan daerah tersebut, kepala desa Ponggok memiliki gagasan untuk mengumpulkan masyarakat, BPD, pemerintah desa dan kelompok warga untuk membahas hal-hal strategis dan salah satunya adalah BUMDes itu sendiri. BUMDes dapat saja menjadi salah satu pondasi untuk memperkuat tradisi di lingkup desa yang juga bermanfaat untuk meningkatkan kondisi perekonomian desa dan memberdayakan masyarakat desa Ponggok sendiri. Akhirnya pemerintah desa Ponggok resmi mendirikan BUMDes itu pada tanggal 15 Desember Tahun 2009 yang berpegang pada peraturan desa No 6 tahun 2009 dengan nama Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri.

Seiring berjalannya waktu, BUMDes sering mendapatkan kendala, meskipun BUMDes sudah ditetapkan melalui musyawarah bersama, masih banyak warga yang memandang dengan sebelah mata terhadap BUMDes Tirta Mandiri. Masyarakat awalnya tidak yakin akan perkembangan dan hasil yang dicapai oleh BUMDes sendiri. BUMDes dianggap tidak berhasil dan tidak akan membawa suatu perubahan di kehidupan masyarakat Ponggok. Namun begitu, bukan berarti semua warga bersifat apatis dan pesimis, meskipun hanya ada beberapa yang ikut berjuang dan merintis BUMDes dari Nol.

Namun, setelah BUMDes mulai merintis usaha demi usaha, warga yang awalnya tidak menyakini akan usaha

yang dirintis BUMDes dan menganggap sebelah mata lambat laun warga mulai bergabung dan ikut menikmati hasil dari adanya BUMDes. Mereka mulai bergabung dan mengikuti kegiatan di BUMDes Tirta Mandiri.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah terjadinya proses perubahan menuju mutu kehidupan yang lebih baik dan mandiri yang proses tersebut perlu direncanakan sedemikian rupa melalui beberapa tahapan (Soleh, 2002: 94). Untuk tujuan yang ingin dicapai oleh BUMDes Tirta Mandiri adalah mengurangi angka pengangguran, meningkatkan peluang usaha bagi masyarakat untuk berinvestasi, sebagai sumber pendapatan asli desa. Output dari adanya BUMDes Tirta Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai keinginan untuk bisa mandiri dan meninggalkan ketidakberdayaan

Masyarakat yang awalnya terbelenggu dengan ketidakberdayaan mereka, ketidakmandirian mereka, banyak yang pengangguran, akan tetapi mereka sudah ditampung untuk ikut bekerja di salah satu usaha yang BUMDes rintis. Jadi mereka sudah tidak susah dalam menghidupi keluarganya. BUMDes telah menyediakan lapangan pekerjaan yang diperuntukan oleh masyarakat desa Ponggok sendiri. Disitu, sehingga masyarakat Ponggok sudah tidak mengambil hutang lagi

ke rentenir. BUMDes mempunyai usaha seperti *Home stay*, area wisata umbul ponggok, area wisata umbul ciblon, toko desa, tempat kuliner, rental mobil, penyewaan gedung.

2. Terbentuknya sosial kemanusiaan yang tinggi

setelah adanya BUMDes Tirta Mandiri masyarakat semakin tinggi sosialnya dalam hal gotong royong, membantu sesama bahkan dalam hal apapun. Seperti yang di paparkan oleh ibu ratmi bahwasanya:

“Masyarakat sini kalau diajak untuk gotong royong langsung mbak tanpa harus di suruh-suruh, karena kita sadar kalau semua itu adalah juga untuk kepentingan kita bersama, apalagi saat ada warga yang terkena musibah kayak gitu dari warga sendiri gitu mengumpulkan sumbangan ke RT untuk diberikan kepada yang lagi terkena musibah mbak. Jadi rasa kekeluargaan masyarakat tinggi” (wawancara dengan Ibu Ratmi pada Tanggal 17 Juli 2019).

Pembagian hasil usaha BUMDes Tirta Mandiri yaitu sebagai berikut:

- 1) Disetor ke APBDes sebesar 30%
- 2) Pengembangan Usaha BUMDes sebesar 25%
- 3) Komisaris, direksi, dan stafkaryawan sebesar 15%
- 4) Cadangan modal sebesar 10%
- 5) Dana pendidikan dan kesehatan sebesar 10%

6) Badan pengawas sebesar 10%

Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat terhadap BUMDes Tirta Mandiri desa Ponggok kecamatan Polanharjo kabupaten Klaten telah sesuai yang dijelaskan dalam buku *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Sosial* (Sumodiningrat, 1999: 134) antara lain sebagai berikut:

1) Penerima manfaat dalam perekonomian

Selama adanya BUMDes Tirta Mandiri, banyak masyarakat yang menerima manfaat dan merasakan adanya peningkatan perekonomian, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rohmah sebagai berikut:

“Alhamdulillah mbak, dulu saya pengangguran tidak bekerja, tapi saat ada wisata Umbul Ponggok ini saya dapat berjualan disini. Yaa untuk menghidupi keluarga cukup lah insyaAllah mbak. Yang penting bisa mendapatkan pekerjaan. Sebagian warga sini juga seperti itu mbak, sejak pemerintah desa memberdayakan masyarakatnya yang dulunya tidak mempunyai pekerjaan dikasih pekerjaan. Desanya sekarang juga rame mbak, banyak pengunjung dari luar kota bahkan juga dari luar jawa juga datang kesini entah itu rombongan mau berwisata atau rombongan yang mau Study Tour di BUMDes Tirta Mandiri (wawancara dengan Ibu Rohmah tanggal 17 Juli 2019)

“Iya mbak Alhamdulillah, itung-itung bisa membantu pendapatan suamilah, dari pada di rumah Cuma nganggur tidak ngapa-ngapain mending saya jualan makanan untuk parawisatawan. Hasilnya ya lumayanlah mbak untuk membiayai sekolah anak, membeli kebutuhan rumah tangga. Disamping itu saya juga mendapatkan pengalaman mbak” (wawancara dengan Ibu Nur tanggal 27 Maret 2019)

“Saya kerja di BUMDes ini juga baru mbak, saya habis kuliah langsung di panggil untuk ikut bergabung disini, ya lumayanlah mbak, buat menambah pengalaman. Yang kerja di sini kan tidak ibu-ibu atau orangtua saja tetapi yang mau bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan. Jadi kan mereka mempunyai pendapatan sendiri” (wawancara dengan Mas Dodi tanggal 27 Maret 2019)

Berdasarkan pemaparan diatas masyarakat telah menerima manfaat adanya BUMDes dan telah mengalami peningkatan ekonomi setelah adanya BUMDes dan bergabung dalam BUMDes. Mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu dalam kebutuhan rumah tangga.

2) Meningkatnya sumber daya manusia (SDM)

Meningkatnya sumber daya manusia (SDM) bisa dibuktikan dengan hasil di bidang sosial yaitu sifat timbal balik yang berpengaruh antara masyarakat satu dengan

masyarakat lainya menyangkut pada aspek-aspek kehidupan masyarakat yang menyangkut dengan adanya perubahan kondisi. Masyarakat yang menjadi penerima manfaat sudah menjadi pribadi yang saling membantu, gotong royong, terbuka, percaya diri, kerja keras, dan memiliki ikatan kekeluargaan antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok lainya dengan kuat.

“Alhamdulillah mbak masyarakat Pongkok banyak yang bergabung di kegiatan BUMDes, mereka sangat berantusias dan juga welcome. Ketika BUMDes mengadakan kegiatan. Ketika ada gotong royong masyarakat juga langsung bilang “ayo” tanpa ada alasan lain untuk tidak ikut serta dalam gotong royong. Dan ketika ada yang terkena musibah kita bareng-bareng untuk membantu dan guyub rukun mbak (wawancara dengan bu sari pada tanggal 3 april 2019)

Dari penjelasan diatas sudah membuktikan bahwa masyarakat desa Pongkok tingkat sosialnya sudah tinggi, tidak ada sekat antara masyarakat satu dengan masyarakat lainya. Mereka berbaur menjadi satu untuk kepentingan bersama.

3) Peningkatan dalam aspek lingkungan

Setelah desa mempunyai tempat wisata desa Pongkok semakin menjadi bersih, dibanding dengan desa Pongkok sebelum adanya tempat wisata.

“Alhamdulillah lumayan sudah bersih mbak di bandingkan dengan sebelum diberdayakan. Karena setelah Pongkok menjadi tempat wisata dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan, masyarakat sadar dan membuat lingkungan sebersih mungkin dan senyaman mungkin untuk para pengunjung yang datang ke pongkok. Agar mereka bisa merasakan keindahan di desa Pongkok”(wawancara dengan Ibu Ayu pada tanggal 24 Agustus 2019).

Masyarakat telah mengubah desanya menjadi desa yang bersih akan sampah. Sampah-sampah dari tempat wisata atau tempat-tempat kuliner yang berada di tepi jalan tepatnya samping kantor kepala desa itu sudah di kasih tempat sampahnya, juga ada kebersihannya. Akan tetapi lahan tempat parkir untuk pengunjung wisatawan sangat kurang memadahi melihat lahan yang dimiliki untuk parkir adalah di badan jalan sekitar area tempat wisata. Membuat keadaan jalan yang semakin tidak beraturan dan tidak enak untuk di pandang. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sari:

“Kalau lingkungan ya bersih iya mbak, akan tetapi kita mempunyai kekurangan dalam hal tempat parkir buat wisatawan yang ingin berkunjung di Pongkok, lahan yang di buat parkir oleh wisatawan hanya berada di badan jalan area wisata, jadi kelihatan masih tidak beraturan mbak. Kalau bus pariwisata kan

parkirnya di halaman kantor kepala desa mbak, tetapi terkadang tidak muat mbak, makanya parkirnya di badan jalan Ponggokdan itu akan semakin membuat macet” (wawancara dengan Ibu sari tanggal 3 April 2019).

4) Peningkatan dalam aspek keagamaan

BUMDes Tirta Mandiri selain memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian masyarakat, BUMDes juga memberdayakan penerima manfaat dalam bidang keagamaan. Salah satunya melalui lazizawa yang bergerak di bagian zakat. Jadi masyarakat bisa memberikan zakat kepada lazizawa yang kemudian dari lazizawa sendiri nanti memberikan zakat itu kepada orang yang fakir miskin.

“Warga sini sudah pada mampu untuk memberikan zakat sendiri mbak, mereka menyisihkan hasil usahanya guna untuk mengeluarkan zakat. Dulu mereka yang menerima zakat, tapi untuk sekarang mereka sudah yang memberi zakat” (wawancara dengan bapak Mahmud sebagai ketua Lazizawa pada tanggal 23 Agustus 2019).

Selain itu masyarakat juga mengadakan pengajian rutin setiap sebulan sekali juga mengadakan pertemuan rutin yang didalamnya

terdapat kajian keagamaan seperti tadarus Al-Qur'an bersama. Sehingga masyarakat mempunyai peningkatan dalam aspek keagamaan. Dan selain itu dari BUMDes setiap yang berpenghasilan setiap gaji dipotong 2,5 % untuk diberikan kepada yang berhak. Dan dari BUMDes mengundi 1 orang/ tahun untuk di berangkatkan umroh secara gratis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Desa (Studi Terhadap BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten) maka dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas desa melalui BUMDes Tirta Mandiri dalam tahapan pemberdayaan dimulai dari 1) tahapan pemaparan masalah dimana ini dilakukan untuk mengumpulkan masyarakat untuk mengupas tuntas suatu permasalahan yang ada. 2) tahapan analisis masalah, tahapan ini dilakukan untuk menganalisis dan mengidentifikasi suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat ponggok. 3) tahapan penentuan tujuan dan sasaran yang dilakukan untuk menentukan tujuan kearah yang ingin dicapai dalam suatu pemberdayaan. 4) tahap perencanaan tindakan guna untuk merancang sebuah tindakan dengan adanya kegiatan-kegiatan dalam waktu jangka pendek maupun dalam waktu jangka panjang. 5) tahap pelaksanaan kegiatan ini

dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang telah diadakan, ikut berpartisipasi dalam segalahal, serta melakukan pelatihan-pelatihan. 6) evaluasi, terhadap ini dilakukan secara formal maupun secara informal

Secara umum proses pemberdayaan masyarakat di desa Ponggok sudah baik. Pada aspek pelaksanaan kegiatan perlu adanya peningkatan lagi untuk memberdayakan agar masyarakat bisa terlibat semua dan bisa merasakan kesejahteraan bersama.

2. Hasil yang telah dicapai dari proses pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Tirta Mandiri adalah meningkatkannya pendapatan masyarakat desa Ponggok, dibanding dulu sebelum adanya BUMDes yang hanya mengandalkan dari pendapatan suami saja. Meningkatnya SDM bagi masyarakat yaitu dengan cara mereka bisa percaya diri, lebih kreatif, mandiri. Dari segi social masyarakat semakin erat dalam menjalin kekeluargaan dengan sesama. Dari segi keagamaan masyarakat sudah mampu membayar zakat dari hasil pendapatannya juga mempunyai keagamaan rutin seperti pengajian, yang digelar sebulan sekali serta keagamaan yang membangkitkan semangat mereka.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Tirta Mandiri desa Ponggok kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten sudah berjalan akan tetapi lebih baik lagi jika masyarakat lebih memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya yang belum tersentuh sama sekali untuk membangkitkan mereka. Ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan agar dapat memujudkan pemberdayaan yang lebih baik, antara lain:

- 1) Untuk warga desa Ponggok hendaknya mendukung dan ikut serta memanfaatkan potensi alam yang dikelola bersama-sama,
- 2) Untuk pengelola BUMDes Tirta Mandiri terus memberikan dukungan dan jebolan ide-ide yang cemerlang untuk membangkitkan masyarakat dalam memberdayakan mereka dan keluar dari ketidakberdayaan. Dengan cara selalu memberi dukungan, motivasi, pengetahuan, pelatihan sehingga mereka mampu dan bisa.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Tiada kemudahan dan setelah kesulitan melainkan atas kehendak Allah SWT. Peneiti menyadari bahwa masih ada banyak kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Aini, Azizah Qurrotu. *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based tourism) di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, Google Scholar*
- Alfitri. 2011. *Community Development Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Anwas, M Oos. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta
- Arsisni. *Pemberdayaan Petani Perempuan* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Walisongo Semarang Tahun 2013)
- Dokumen BUMDes Tirta Mandiri desa Ponggok, dikutip pada tanggal 23 Februari 2019 jam 10.00 WIB
- Hasyim. 2019. *Community Development Berbasis Ekonomi*. Jakarta: Diadit Media
- Hikmat, Harry. 2013. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press
- Ife, Jim & Frank Tesoreiro. 2006. *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Khairin, dkk. *Pemberdayaan Petani Kebun Pisang di Lahan Kosong Sekitar Bandara Ahmad Yani Semarang* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014)

- Mahmud. 2014. *Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko soebiato. 2015 *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Moelong, Lexy J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nadian, Ferdian Tonny. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Obor
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Pratama, Crivi, 2016. *Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan perempuan desa joho di desa lereng gunung kidul*. (Jurnal Unair. Surabaya diakses tanggal 18 Juli 2019)
- Remiswal. 2013. *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soekanto, Soerjono. 215. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Soetomo. 2013. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Soleh, Habib. 2014. *Dialetika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokus Media

Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. 2013. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta

Sumaryadi, Nyoman. 2013. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia

Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama

Supena, Ilyas. 2017. *Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengelolaan Limbah Industri Tekstil di Desa Brumbung Mranggen Demak* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo Semarang Tahun 2017)

Syarbani, Syahrial dan Fatkhuri. 2016. *Teori Sosiologi Suatu Pengantar*. Bogor. Ghalia Indonesia

Zubaedi. *Pembangunan Masyarakat Wacana & Praktik*. Jakarta: Prenadia Group

Peraturan Menteri Desa PDTT No 15 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa

Peraturan presiden Republik Indonesia No 12 tahun 2015 tentang kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi

Sumber dari skripsi dan jurnal

Imamuddin. 2108. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* Studi di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Prasetyo, Ratna Azis. 2016. *Peran BUMDes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro*

Ovi, Dantika. 2013. *Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul*

Rahmadanik. *Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan*

Septian, Agung. 2012. *Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto*

Sumber Internet

www.scribd.com/document/343862624/Pengertian-Proses-Menurut-Para-Ahli-doc diakses pada tanggal 15 Juli 2019 jam 14.50

<https://www.idpengertian.com/pengertian-komunitas-dan-contohnya/> diakses pada tanggal 20 Juli 2019 jam 18.44

<http://justinlase.blogspot.com/2017/02/komunitas-ciri-komunitas-dan-aset.html> diakses pada tanggal 30 Juli 2019 jam 12.45

DRAFT WAWANCARA

Bagi pemerintahan desa

1. Bagaimana awal mula pemerintahan desa ponggok mendirikan BUMDes Tirta Mandiri?
2. Bagaimana keadaan masyarakat desa ponggok sebelum dan sesudah adanya BUMDes Tirta Mandiri?
3. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat desa ponggok?
4. Siapa yang terlibat dalam proses pemberdayaan?
5. Apakah keberadaan BUMDes Tirta Mandiri membantu pemerintahan dalam memberdayakan masyarakat?
6. Bagaimana bentuk dukungan pemerintahan desa Ponggok dalam pengembangan BUMDes Tirta Mandiri?
7. Bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDes Tirta Mandiri?
8. Bagaimana cara BUMDes memberdayakan masyarakat desa Ponggok?
9. Apa kegiatan yang dilakukan dalam memberdayakan masyarakat?
10. Bagaimana hasil pemberdayaan yang dilakukan BUMDes?
11. Apa kendala yang dialami selama proses pemberdayaan?

12. Program apa yang dilakukan BUMDes untuk memberdayakan masyarakat?

Bagi pengelola BUMDes Tirta Mandiri

1. Bagaimana cara BUMDes Tirta Mandiri untuk memberdayakan masyarakat desa?
2. Program apa saja yang dilakukan BUMDes Tirta Mandiri untuk memberdayakan masyarakat desa?
3. Apa kunci keberhasilan memberdayakan masyarakat sekitar?
4. Apa program yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat?
5. Bagaimana hasil pemberdayaan dari segi sosial setelah adanya BUMDes?
6. Bagaimana hasil pemberdayaan dari segi budaya, ekonomi, dan agama setelah adanya BUMDes?
7. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakatnya?
8. Bagaimana cara BUMDes memberdayakan masyarakat desa Ponggok?
9. Apa kendala dalam pengelolaan BUMDes?
10. Siapa pelaku pemberdayaan?

Bagi pelaku usaha, masyarakat desa, dan mitra

1. Bagaimana manfaat BUMDes pada Pemberdayaan masyarakat?

2. Apakah BUMDes mempunyai dampak positif bagi pemberdayaan Masyarakat?
3. Bagaimana cara BUMDes memberdayakan masyarakat desa Ponggok?
4. Apa yang membuat anda percaya terhadap pemberdayaan yang dilakukan BUMDes Tirta Mandiri?
5. Bagaimana peran masyarakat dalam membantu memberdayakan masyarakat desa Ponggok?
6. Apakah BUMDes Tirta Mandiri melibatkan anda dalam setiap mengambil keputusan bersama?
7. Apakah harapan anda untuk BUMDes dalam memberdayakan masyarakat?

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Foto bersama direktur BUMDes Ponggok



Foto bersama Kepala desa



Wawancara dengan Ibu sari sebagai sekretaris BUMDes







Warung kuliner Pongkok



Produk khas Pongok olahan Nila

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Kumilasari
NIM : 1501046059
TTL : Pati, 17 Juli 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Ali Makmur
Nama Ibu : Khodijah
Alamat Asli : Desa Guyangan Kecamatan
Trangkil Kabupaten Pati
Email : Mila_imuet61@yahoo.com

Pendidikan Formal :

1. TK Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati
2. MI Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati
3. MTs Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati
4. MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati
5. UIN Walisongo Semarang angkatan 2015

Pendidikan Non Formal :

1. Ponpes Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati
2. Ponpes Tahfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugu Semarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan semoga dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Oktober 2019
Penulis,

Nur Kumilasari
NIM 1501046059